PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2013 sebagai landasan penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42).
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 disusun dengan maksud sebagai:
   a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Renja-SKPD Tahun 2013;
   b. landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

BAB II

RUANG LINGKUP RKPD PERUBAHAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 3

(1) Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini meliputi materi:
   a. Buku I : Pokok-pokok RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
   b. Buku II : Matrik Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013.
(2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. Bab I : Pendahuluan;
   b. Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II;
   c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.
(3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat matrik perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah tahun 2013.

Pasal 4

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN RKPD PERUBAHAN APBD PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 5

RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Juli 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

BUKU I

POKOK–POKOK RKPD PERUBAHAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang RKP Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunannya, RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 telah menempuh beberapa tahapan yaitu penyusunan rancangan awal,

rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2013 **"Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat"** yang terdiri dari 11 prioritas yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2013 diatas dan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maka ditetapkanlah tema pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013, yaitu **"Bersatu Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kawasan/Wilayah"** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) infrastruktur wilayah dan kawasan; (2) ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; (3) iklim investasi dan unggulan daerah; (4) peningkatan kualitas SDM dan penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan; serta (5) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam perkembangannya, RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi perekonomian nasional saat ini yang fluktuatif sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada kerangka ekonomi makro Provinsi Banten yang perlu penyusaian target proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sebagaimana penyesuaian target nasional yang mengkoreksi kembali Laju Pertumbuhan Ekonomi yang semula 6,3% menjadi 5,8% dan proyeksi tingkat inflasi sebesar 7,2% maka terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2013 yang diproyeksikan sebesar 6,50-6,70%

perlu dikoreksi sebagai bentuk antisipasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Atas masukan Bank Indonesia Perwakilan Banten, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2013 dikoreksi menjadi sebesar 5,7%-6,0% serta berdasarkan data BPS Provinsi Banten untuk Laju Inflasi semester pertama tahun 2013 mencapai 8,7%, maka proyeksi tingkat Laju Inflasi di Provinsi Banten diperkirakan sebesar 9,5% sampai dengan 11%.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 juga masih belum mengakomodasi isu strategis/permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani diantaranya percepatan pendirian Bank Banten sebagai bank daerah yang berfungsi sebagai *Agent of Regional Development* sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, untuk mewujudkan misi ke-5 yaitu peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, ditempuh melalui strategi pembangunan salah satunya meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) dengan arah kebijakan Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) Tahun 2014.

Untuk mewujudkan pendirian Bank Banten tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Sejalan dengan hal tersebut, sisa lebih pagu anggaran (SiLPA) sebelumnya sebagai penerima pembiayaan sebagian dipergunakan sebagai penyertaan modal untuk Bank Banten pada pengeluaran pembiayaan.

Selain Bank Banten, kebijakan yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat adalah rencana operasional RSUD Banten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagai SKPD tersendiri yang menyebabkan penyesuaian anggaran khususnya SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Hal ini termasuk dalam kebijakan perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD melalui pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam kerangka peningkatan kesehatan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu belum terakomodasinya persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 serta kegiatan luncuran pada Dinas Sumberdaya Air dan Permukiman (SDAP) untuk membiayai kegiatan yang merupakan skala prioritas atau kebutuhan mendesak daerah.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang akan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2013 guna penyusunan APBD Perubahan Tahun 2013.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42).
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya dokumen RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 adalah untuk mengakomodasi permasalahan mendesak yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2013 dan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten dengan tetap mengacu pada tema RKPD Provinsi Banten tahun 2013 yaitu **"Bersatu Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kawasan/Wilayah".**

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 antara lain:

a. sebagai acuan penyusunan perubahan rencana kerja bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada Tahun 2013;

b. sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2013;
c. sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
d. menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
e. sebagai acuan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
f. sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN RKPD PERUBAHAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 disusun dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. adanya peningkatan realisasi pendapatan daerah hingga akhir semester satu, dan perubahan proyeksi pendapatan pada semester dua;
2. adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. Banten Global Development (PT. BGD) untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten;
3. Rumah Sakit Umum Banten sebagai SKPD Provinsi Banten;
4. adanya kegiatan lanjutan Tahun 2012 dan /atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Khususnya Kegiatan Luncuran pada Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman);
5. persiapan Pemilu Tahun 2014;
6. peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;
7. perubahan kerangka ekonomi, pertumbuhan ekonomi karena tekanan global;
8. faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;

9. perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
10. adanya keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan RKPD Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

Berisikan uraian tentang kondisi umum daerah, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RKPD PERUBAHAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Berisikan uraian tentang arah kebijakan keuangan daerah, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2013.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan pada kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan evaluasi triwulanan II tahun berjalan (Tahun 2013).

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012

Untuk mengukur tingkat kinerja pada empat agenda pembangunan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus merujuk pada rencana capaian ke 4 (empat) agenda tersebut sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007–2012. Ada 9 (sembilan) Indikator Makro Pembangunan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut, yaitu :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
3. Indeks Pembangunan Daerah (IPD);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPM-G);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. Jumlah Penduduk Sangat Miskin (Penduduk Miskin);
7. Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM);
8. Jumlah Pengangguran Terbuka;
9. Persentase Pengangguran Terbuka.

Pada indikator IPM, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten berhasil mencapai angka 71,22%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2011 yaitu 70,95. Hal ini menunjukan Provinsi Banten cukup berhasil meningkatkan kinerja dalam bidang pembangunan manusia dari tahun sebelumnya. Kondisi ke 9 (sembilan) indikator kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012 terlihat sebagaimana Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Indikator Makro Pembangunan Daerah di Provinsi Banten

Tahun 2011-2012

No	Indikator	Satuan	2011	2012		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,95	72,88	71,22	97,72
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,43	6,50 – 6,80	6,15	92,48
3	Indeks Pembangunan Daerah (IPD)	%	93,15	89,20-90,00	96,54	107.75
4	Indeks Pembangunan Gender (IPM-G)	%	65,00	67,40	63,84	117,79
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	53,00	54,20	71,02	131,03
6	Jumlah Penduduk Sangat Miskin	Jiwa	690.870	650.000-600.000	648.254	96,28
7	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	%	24,58	25-23	20,00	116.67
8	Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	680.564	600.00	519.210	113.47
9	Persentase Pengangguran Terbuka (% jumlah pengangguran/jumlah penduduk)	%	7,15	5,60-5,20	4,61	114,63
	Persentase Pengangguran Terbuka (% jumlah pengangguran/Jumlah angkatan kerja)	%	13,06	12,25	10,13	117,51

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS 2013

Pencapaian indikator-indikator makro ini merupakan capaian kinerja dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten baik pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta kontribusi terbesar berasal dari swasta dan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya LPE Provinsi Banten pada tahun 2011 berada pada angka 6,39%, angka ini kemudian menjadi 6,15% di tahun 2012.

Hal-lain berdasarkan indikator makro di Provinsi Banten terjadi penurunan jumlah penduduk sangat miskin menjadi 648.254 jiwa pada tahun 2012. Angka realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011 yaitu 690.870 jiwa. Berdasarkan target dan realisasi capaian kinerja penurunan penduduk sangat miskin di Provinsi Banten sebesar 96,28%.

Relevansi penurunan jumlah penduduk sangat miskin tersebut dapat terlihat pada indikator Persentase RTM yang mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, Persentase RTM di Provinsi Banten mencapai angka 24,58%, dan jumlah ini menurun menjadi 20,00% pada tahun 2012, capaiannya sudah melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu 116,67%.

Pada indikator IPD, Provinsi Banten juga menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 Provinsi Banten mencapai angka 93,15%, jumlah ini kemudian menjadi 96,54% pada tahun 2012. Capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 107,75%. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah dapat meningkatkan keberdayaan pemerintah, perkembangan wilayah dan keberdayaan masyarakat dari tahun sebelumnya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tahun 2012, jumlah pengangguran terbuka mencapai angka 519.210 Jiwa, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai 680.564 jiwa, bahkan dengan upaya yang telah dilakukan secara bersama dan sinergis diantara pelaku pembangunan di Provinsi Banten mampu mengurangi TPT di Provinsi Banten dari 13,06% pada tahun 2011 menjadi 10,13%. Selain melalui 9 (sembilan) indikator makro diatas mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Banten kita juga dapat diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Provinsi Banten yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012.

Adapun hasil capaian Kinerja Utama Provinsi Banten Tahun 2012 yang juga disesuaikan dengan ke 4 (empat) agenda pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 sebagai berikut:

A. Agenda Pemerintahan

Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada Agenda Pemerintahan, dapat dilihat dari nilai capaian kinerja program-program yang diselenggarakan pada agenda ini adalah :

1. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah**

   Sasaran dalam program ini adalah Penataan regulasi manajemen sumber daya aparatur dengan. Indikator untuk mengukur program ini adalah Standar Pelayanan Minimal pada SKPD yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Publik dengan nilai capaian 100%, Rasio

Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran dengan nilai capaian 99,11%, Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan SKPD Nilai capaian 100%. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah nilai capaian 97,25%, Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur nilai capaian 100%, dan Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD dengan nilai capaian 100%. Sehingga rata-rata nilai capaian program ini sebesar 100%. Jumlah kesepakatan pembangunan dengan pemerintah perbatasan, regional dan bilateral dengan nilai capaian 100%.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Ada tiga sasaran yang hendak dicapai dalam program ini, yaitu:

a. Meningkatkan Pemerataan/Penempatan Sumberdaya Apatur

   Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini,ada dua indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu : Cakupan Fasilitas PNS pindah dan purna tugas yang memperoleh pembekalan/penghargaan yang ditargetkan tahun 2012 sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga nilai capaian kinerjanya 100%. Cakupan pembinaan mental, disiplin, kompetensi dan peningkatan sumber daya aparatur serta penataan administrasi bidang kepegawaian target tahun 2012 sebesar 20,00% dan terealisasi sebesar 17,98%, sehingga nilai capaian indikator ini 89,90%. Rata-rata nilai capaian sasaran peningkatan pemerataan/penempatan sumber daya aparatur adalah 94,95%.

b. Pemanfaatan Pegawai untuk Penanganan Program/Kegiatan Strategis Pembangunan

   Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu : Rasio Pembinaan dan Peningkatan Disiplin serta Profesionalisme SDM Aparatur pada tahun 2012 adalah sebesar 24,96% dengan realisasi sebesar 23,95% sehingga nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 95,95%.

c. Pemantapan Budaya Kerja Aparatur yang Profesional dan Cerdas dan Sesuai Aturan Formal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada satu indikator capaian kinerja yang digunakan yaitu: Rasio Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya, Workshop serta Sosialisasi peraturan Perundang–undanganpada tahun 2012 adalah sebesar 40,98% dengan realisasi sebesar 40,44%, dengan demikian nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 98,68%.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Ada dua sasaran dalam penyelenggaraan program ini, yaitu penguatan komunikasi pemerintahan antara Pemda dan DPRD dan peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program ini adalah : Rasio Nota Kesepakatan dengan DPRD pada tahun 2012 adalah 100% terealisasi 88,30% dengan demikian nilai capaian kinerja sebesar 88,30%. Sasaran yang kedua yaitu penguatan komunikasi pemerintahan antara Pemda dan DPRD dengan indikatornya yaitu Rasio Aspirasi Masyarakat yang terakomodir dalam Anggaran Pembangunan tahun 2012 dengan target sebesar 100%, sedangkan realisasinya 100%, capaian kinerja 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah adalah sebesar 94,15%.

4. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Ada empat sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan program perencanaan pembangunan yaitu tersedianya dokumen rencana aksi program-program strategis, tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan, tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, dan tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan yaitu Jumlah RAD Penanggulangan Kemiskinan, Jumlah Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah, Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Anggaran Pembangunan, capaian kinerja

masing-masing indikator 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program sebesar 100%.

5. **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur**

   Sasaran program ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah rasio Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap jumlah obyek pemeriksaan, target untuk tahun 2012 adalah 90,00% dan realisasinya sebesar 89,96%, sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 99,96%.

6. **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

   Ada dua sasaran dalam program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yaitu : Rasio Pembentukan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BNP, Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Peternakan Kehutanan, KPAID, KPID, SET KORPRI, Komisi Aid dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) dengan indikator Rasio Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah tahun 2012 dimana target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi 96,37%, sehingga nilai capaian kinerja 96,37%.

   Sasaran kedua yaitu Rasio Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan Indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Kelembagaan/SKPD Terhadap Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan yang memiliki Target Rasio Kelembagaan/SKPD terhadap penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Pembangunan tahun 2012 sebesar 93% terealisasi 91,19%, sehingga nilai capaiannya sebesar 98,05%. Rata-rata nilai capaian kinerja program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah sebesar 97,21%.

7. **Program Pengembangan Telematika dan Informatika**

   Ada 3 (tiga) sasaran dalam penyelenggaraan program pengembangan Telematika dan Informatika yaitu: Penerapan norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika yang terpadu, aksesibilitas tinggi dan kapasitas mencukupi dan mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dan manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan

kepada masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan adalah : Rasio penyusunan dan sosialisasi aturan perundang-undangan, norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika, Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan informatika yang terpadu dengan pemanfaatan penggunaan teknologi, Rasio peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan Telematika dan informatika Berdasarkan Indikator tersebut, Rasio penyusunan dan sosialisasi aturan perundang-undangan, norma, standar dan prosedur telematika dan informatika, penerapan layanan telematika dan informatika dari target 33,51%, terealisasi 33,51%, dengan demikian capaiannya 100%. Rasio Pengembangan Pelayanan Telematika dan informatika yang terpadu dengan pemanfaatan penggunaan teknologi dari target 21,83% terealisasi 21,83%, dengan demikian capaiannya 99,98%. Rasio peningkatan dan pengembangan sistem pelayanan telematika dan informatika dari target 73,13% terealisasi 73,13%, dengan demikian nilai capaiannya 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan adalah 99,76%.

8. **Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan**

   Sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama pemerintahan dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan dengan pemerintah perbatasan dan regional dengan nilai capaian indikator diatas sebesar 100%, sehingga nilai capaian kinerja program peningkatan kerjasama pembangunan adalah sebesar 100%.

9. **Program Fasilitasi dan Penataan Daerah Otonom Baru**

   Sasaran program ini adalah penataan daerah otonom dalam rangka pelayanan publik dengan dua indikator kinerja yaitu rasio koordinasi dan fasilitasi penataan daerah otonom baru dan rasio sosialisasi paraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan dengan capaian 100% dari target 100%.

10. **Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Pemerintah Daerah**

Tiga sasaran dari program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan pemerintah daerah adalah pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab/Kota, sasaran kedua yaitu pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi dan peningkatan pendayagunaan aset daerah. Untuk mengukur nilai capaian kinerja ketiga sasaran ini, indikator yang digunakan adalah Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH dan Ped. RKA).

Target kinerja indikator Jumlah Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota pada tahun 2012 adalah 8 (delapan) dokumen dan terealisasi 8 (delapan) dokumen sehingga nilai capaiannya sebesar 100%.Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Anggaran (ASB, SSH, dan Ped. RKA) yang ditargetkan pada tahun 2012 sejumlah 2 (dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen sehingga nilai capaianya sebesar 100%. Rasio Aset daerah terhadap jumlah PAD dengan target yang ditetapkan sebesar 225% terealisasi sebesar 266,28% sehingga capaian kinerjanya sebesar 118,35%. Rata-rata nilai capaian program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan pemerintah daerah adalah 104,59%.

11. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pedesaan**

Sasaran pertama program ini adalah meningkatnya Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemerintahan desa dan kapasitas kelembagaan desa dengan indikator kinerja Rasio Desa Yang Mengalami penguatan fungsi BPD/kelembagaan aparatur pemerintahan desa terhadap jumlah desa keselurahan dengan target sebesar 47,72% dimana realisasi kinerjanya sebesar 47,72%, sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 100%. Target indikator yang kedua yaitu rasio desa yang mengalami penguatan KPM adalah sebesar 79,34% dengan realisasi sebesar 69,03%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 87,01%. Indikator selanjutnya, yaitu Rasio Desa yang memiliki dokumen perencanaan desa dan APBD Desa terhadap terhadap jumlah desa dimana target yang ditetapkan sebesar 47,72%

dengan realisasi sebesar 47,72%, sehingga rata-rata capaian sasaran program ini adalah sebesar 95,67%.

Sasaran kedua meningkatnya penguatan kelembagaan posyandu dengan target indikator kinerja rasio pembinaan Forum Kader Posyandu desa/kelurahan oleh Provinsi sebesar 19,70% dapat terealisasi sebesar 19,70% sehingga capaian indikator dan sasaran program ini sebesar 100%.

Sasaran ketiga, yaitu Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang usaha ekonomi masyarakat perdesaan dan perkotaan dengan target pada indikator kinerja Rasio Jumlah desa yang melakukan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan terhadap jumlah desa keseluruhan sebesar 3,62% dengan realisasi sebesar 3,62%, sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Indikator kinerja kedua dari sasaran ini yaitu rasio jumlah desa yang melakukan pendayagunaan teknologi tepat guna terhadap jumlah desa keseluruhan dengan target 10,06% dapat terealisasi sebesar 10,06%, sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar 100%.

Sasaran meningkatkan jaringan kelembagaan organisasi perempuan dengan target indikator kinerja Rasio Pembinaan PKK dan Rasio Pembinaan P2WKSS sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya kinerja kedua indikator ini adalah sebesar 100%. Target indikator kinerja yang terakhir yaitu rasio pembinaan TKP3 sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 97,96% sehingga rata-rata capaian kienrja program ini adalah sebesar 99,32%.

12. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Program ini memiliki satu sasaran yaitu Peningkatan peran serta dan kualitas satuan Linmas dan Satpol PP dalam pemeliharaan ketertiban umum dan dua indikator kinerja yaitu Rasio operasi penegakan peraturan daerah dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan Kejadian politik praktis massa/demonstrasi dalam satu tahun.

Target pada indikator kinerja Rasio operasi penegakan peraturan daerah dan target indikator kinerja kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan

realisasi sebesar 100% dan target kinerja indikator Kejadian politik praktis massa/demonstrasi dalam satu tahun sebesar 63% dengan realisasi sebesar 63% dengan capaian sebesar 100%. Maka nilai rata-rata capaian kinerja program ini adalah sebesar 100%.

13. **Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM**

    Sasaran program ini adalah sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah, antar pusat, Provinsi dan Kab/Kota untuk mewujudkan kebutuhan, perencanaan strategis, dan pelayanan publik. Untuk mengukur sasaran ini indikator yang digunakan adalah jumlah sosialisasi dan desiminasi produk hukum pusat, Provinsi dan Kab/Kota, target untuk tahun 2012 adalah 75% dan realisasinya sebesar 75%, sehingga nilai capaian kinerja program Peningkatan kesadaran dan pengembangan produk Hukum dan HAM sebesar 100%.

14. **Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

    Ada dua sasaran yang hendak dicapai dalam program ini yaitu peningkatan derajat kepercayaan masyarakat dan kualitas kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan kualitas kesadaran hukum dan politik. Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Gangguan Keamanan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Asumsi Max = 12%) dan Rasio Forum kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa.

    Berdasarkan dua indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah Gangguan Keamanan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha (Asumsi Max = 12%) dan Rasio Forum Kewaspadaan dini masyarakat dan sosialisasi pemahaman nilai-nilai ideologi bangsa diperoleh nilai rata-tara capaian kinerja program pendidikan politik masyarakat dan pengembangan wawasan kebangsaan sebesar 100%.

    Berdasarkan nilai capaian kinerja 14 (empat belas) program yang diselenggarakan pada agenda pemerintahan diatas, maka rata-rata nilai capaian kinerja program ini adalah sebesar 97,08%.

15. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Lokal

Sasaran program ini adalah Pemanfaatan nilai-nilai Tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah dengan target indikator kinerja Jumlah Implementasi Nilai-nilai budaya lokal sebesar 100% dapat teralisasikan sebesar 100%, maka rata-rata capaian kinerja program ini adalah sebesar 100%.

16. Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Budaya Lokal

Peningkatan penyelenggaraan apresiasi festival/pagelaran seni dan budaya daerah dikalangan pemerintah, masyarakat dan swasta dengan target indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Banten adalah 2 (dua) Festival Seni dan Budaya Banten, dan realisasinya sebesar 2 (dua) Festival Seni dan Budaya Banten sehingga nilai capaian kinerja program ini 100%.

B. Agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja Pemerintahan Provinsi Banten pada Agenda Pengembangan SDM, berdasarkan nilai capaian kinerja program-program yang diselenggarakan pada Agenda Pengembangan SDM, yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran program ini adalah meningkatnya akses prasekolah. Untuk mengukur sasaran ini indikator kinerja yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, target untuk tahun 2012 adalah 25% dan realisasinya sebesar 32%, sehingga nilai capaian kinerja program ini 128%.

2. Program WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan WAJAR 12 Tahun

Ada 2 (dua) sasaran dalam penyelenggaraan program ini yaitu meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah (SMP/MTs/SMPL/Paket B/Wustho) dan Meningkatnya angka partisipasi sekolah murni (APM) jenjang SD (termasuk SDLB dan MI) dan untuk mengukur capaian kinerja sasaran di atas, indikator kinerja yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMLB/Paket B/Wustho, dan APM Jenjang SD/SDLB/MI/paket A.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/SMPLB/Paket B/Wustho, target tahun 2012 adalah 99,25% dengan realisasi 99,86%, sehingga

nilai capaiannya 100%, indikator berikutnya adalah APM jenjang SD/SDLB/MI/Paket A, target tahun 2012 adalah 99% dengan realisasi 98,85% sehingga nilai capaiannya 99,84%. Rata-rata nilai capaian kinerja program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun adalah sebesar 100%.

3. **Program Pendidikan Menengah**

   Sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah yaitu meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) AMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C.

   Target kinerja untuk angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C sebesar 70.20%, terealisasi 63.54%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2012 mencapai 90,51%.

4. **Program Pendidikan Tinggi**

   Sasaran program pendidikan tinggi adalah meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) PT/PTA. Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tersebut indikator yang digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA.

   Berdasarkan indikator diatas, target kinerja untuk angka partisipasi kasar (APK) PT/PTA sebesar 12,25%, terealisasi 12,25%. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2012 mencapai 100%.

5. **Program Pendidikan Berkebutuhan Khusus**

   Sasaran program pendidikan berkebutuhan khusus, yaitu meningkatnya rasio jumlah siswa yang mengikuti pendidikan luar biasa pada tingkat SDLB, SMPLB, SMALB dan sederajat, indikator kinerjanya disatukan dengan program WAJAR DIKDAS 9 (sembilan) Tahun dan program Pendidikan Menengah.

6. **Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat**

   Sasaran program ini adalah meningkatnya minat baca penduduk dan terkelolanya arsip dan dokumen daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Pengunjung pada TBM, Perpusda dan Perpustakaan Keliling, Rasio Pelayanan Administrasi kearsipan.

   Target jumlah pengujung pada TBM, Perpusda, dan perpustakaan keliling pada tahun 2012 adalah sebesar 20%, terealisasi 19,16% sehingga capaiannya sebesar 95,80%. Target Rasio Pelayanan

Administrasi kearsipan sebesar 20%, terealisasi 20% sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program pengembangan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat sebesar 97,90%.

7. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Ada tiga sasaran penyelenggaraan program ini adalah yang pertama adalah Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Formal dengan indikator kinerja meningkatnya rasio jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non formal yang telah memiliki uji kompetensi dengan target 80,00% terealisasi 78,51%, dengan demikian capaian kinerjanya 98,14%.

Sasaran kedua yaitu penyelenggaraan program ini adalah Meningkatnya Mutu Tenaga Kependidikan dengan target indikator sasaran Rasio Jumlah Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya 70,00% terealisasi 64,73%, dengan demikian capaian kinerjanya 92,47%.

Sasaran ketiga adalah Meningkatnya Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan dengan target indikator kinerja Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1/D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan sebesar 70,00% dengan realisasi sebesar 67,43% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 96,33%.

Berdasarkan hasil capaian sasaran, maka rata-rata capaian kinerja program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar 95,65%.

8. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sasaran yang hendak dicapai pada program ini, yaitu meningkatnya rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerjanya, yaitu Rasio Ketersediaan Instrumen Pengelolaan Pelayanan Pendidikan terhadap Kebutuhan Instrumen Keseluruhan.

Rasio ketersediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan instrumen keseluruhan yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah 100% terealisasi 95,19%, sehingga nilai capaian

95,19%. Rata-rata nilai capaian kinerja program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan sebesar 95,19%.

9. **Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Kecakapan hidup**

   Sasaran program ini adalah menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 (lima belas) tahun keatas, meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula dan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/Paket C. Indikator kinerja yang digunakan adalah Angka Buta Aksara Penduduk berusia 15 (lima belas) Tahun ke atas, Angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/Paket C.

   Angka buta aksara penduduk berusia 15 (lima belas) tahun keatas ditargetkan 4,00% pada tahun 2012, dan terealisasi 3,78%, sehingga nilai capaiannya 94,50%. Target angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A/Ula pada tahun 2012 sebesar 99,00% terealisasi sebesar 98,85%, sehingga nilai capaiannya sebesar 99,85%. Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/Paket C ditargetkan 70,20% terealisasi 63,54% nilai capaian kinerjanya sebesar 90,51%. Rata-rata nilai capaian kinerja program pendidikan Non Formal, informal dan kecakapan Hidup sebesar 93,84%.

10. **Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**

    Sasaran program ini adalah meningkatnya organisasi kepemudaan yang telah mendapatakan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan. Untuk mengukur sasaran ini, indikator yang digunaka adalah rasio organisasi kelompok kepemudaan yang telah mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan kepemimpinan, total 46 organisasi. Target untuk tahun 2012 adalah 100%, terealisasi 94,76%, dengan demikian nilai capaian kinerja program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar 94,76%.

11. **Program Pengembangan Manajemen, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga**

    Sasaran program ini adalah terbinanya cabang olahraga yang berprestasi dan meningkatnya kegiatan olahraga di masyarakat, meningkatnya jumlah pelaku olahraga yang berprestasi serta rintisan perguruan tinggi olahraga. Indikator kinerja yang digunakan adalah

Jumlah organisasi/perkumpulan olahraga masyarakat yang dibentuk/dibina (total s.d. 2012 sebesar 53 perkumpulan) dengan capaian sebesar 97,64%, Jumlah pelaku olahraga yang berpretasi dengan capaian sebanyak 125 orang dan indikator kinerja Fasilitasi Perintisan Pendirian Pendidikan Tinggi Olahraga dengan capaian 98,80%. Maka rata-rata capaian kinerja program Pengembangan Manajemen, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga sebesar 100%.

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terbangunnya *sport center* merupakan sasaran program dengan indikator kinerjanya Pembangunan Sport Centre/Pengembangan PPLP, target yang ditetapkan adalah sebesar 2 (dua) kawasan dengan realisasi kinerja 2 (dua) kawasan sehingga capaian kinerja indikator dan program ini adalah sebesar 100%.

13. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pada program ini sasaran yang telah ditetapkan adalah tertanggulanginya penyakit menular dan tidak menular dengan tiga indikator yang pertama, yaitu penanggulangan kasus DBD target kinerja sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 87,53%, penanganan kasus kusta target kinerja sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 86,97% dan indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 97,81%. Maka rata-rata capaian kinerja program ini adalah sebesar 97,23%

14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas gizi masyarakat dengan indikator Prevalensi Gizi Buruk pada Bayi dan Balita dengan target kinerja sebesar 0,70% realisasi kinerja 0,68%, sehingga capaian program ini adalah sebesar 97,14%.

15. Program Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan

Sasaran meningkatnya sumber daya, sistem informasi dan penelitian kesehatan masyarakat, dengan indikator Institusi Pendidikan Kesehatan yang telah terakreditasi dengan capaian 90,50%, jumlah penelitian bidang kesehatan, jumlah puskesmas melaksanakan SIK dan indikator Jumlah tenaga medis yang di diklatkan/dilatih

keterampilannya dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100%. Maka capaian kinerja program ini sebesar 97,63%.

16. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Pada program ini memiliki empat sasaran yaitu tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit rujukan tingkat Provinsi dengan target indikator Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi sebesar 100% realisasi sebesar 98,96%.

Sasaran penyediaan alat kesehatan dan kedokteran dengan target ketersediaan peralatan kesehatan untuk pelayanan dasar sebesar 100% dengan realisasi sebesar 98,52%. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya diwilayah perbatasan dengan indikator Jumlah puskesmas yang dibangun atau ditingkatkan oleh Provinsi dengan target 4 (empat) unit realisasi sebesar 4 (empat) unit.

Berdasarkan capaian indikator tersebut diatas maka rata-rata capaian kinerja program ini adalah sebesar 99,16%.

17. **Program Penyediaan Obat, Pembekalan Kesehatan, Pengawasan Makanan dan Kefarmasian**

Sasaran programnya yaitu terlaksananya pengawasan obat dengan indikator cakupan operasi/pengawasan obat dengan target sebesar 100% sedangkan realisasi sebesar 98,67%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 98,67%.

18. **Program Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat**

Program ini memiliki dua sasaran yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan indikator rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dengan capaian kinerja sebesar 90,00%, indikator cakupan desa siaga aktif dengan capaian kinerja sebesar 96,28% dan indikator jumlah poskestren dengan nilai capaian sebesar 97,60%. Maka rata-rata capaian kinerja Program Promosi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat adalah sebesar 94,40%.

19. **Program Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan**

Sasaran program ini adalah Masyarakat Pekerja Formal dan Informal di Provinsi Banten dengan target indikator kinerja Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sebanyak 125

(seratus dua puluh lima) perusahaan dengan realisasi 122 (seratus dua puluh dua) perusahaan. Maka rata-rata capaian kinerja program peningkatan kemitraan dalam pelayanan kesehatan adalah sebesar 97,60%.

20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Sasaran program ini adalah meningkatnya kesehatan lingkungan dengan indikator cakupan jumlah rumah tangga dengan target indikator Cakupan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 87,47%. Maka capaian kinerja program Pengembangan Lingkungan Sehat adalah sebesar 97,19%.

21. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak dan Revitalisasi Keluarga-Berencana

Sasaran kinerja program ini adalah Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak dengan indikator cakupan peserta KB aktif dengan target sebesar 90,00% dan realisasi sebesar 87,94% sehingga rata-rata capaian kinerja program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak dan Revitalisasi Keluarga-Berencana adalah sebesar 97,71%.

22. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Ada dua sasaran program ini, yaitu Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia, Anak, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan eks Korban Napza/HIV/AIDS dan Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi PMKS dan Panti. Dengan target Indikator kinerja Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) sebanyak 2.000 (dua ribu) orang dengan realisasi sebanyak 1.982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) orang, target indikator Pembinaan Eks Kusta sebesar 150 (seratus lima puluh) Orang dengan realisasi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) Orang dan indikator Terselenggaranya Bimbingan Pencegahan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS bagi 400 (empat ratus) orang dengan realisasi sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) orang serta target indikator bimbingan lanjut bagi WTS sebesar 70 (tujuh puluh) orang dan realisasi 69 (enam puluh sembilan) orang dengan capaian sebesar 98,57%. Rata-rata capaian program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah sebesar 98,70%.

23. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Dua Sasaran Program ini adalah Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Sosial dan Terbina dan meningkatnya peran karang taruna, TKSM, Orsos dan dunia usaha dengan indikator kinerja Sosialisasi NK3 terhadap Guru Sejarah dan Generasi Muda dan Orsos/LSM dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 99,60% dan 98,75%. Rata-rata capaian kinerja program pemberdayaan Kelembagaan Sosial adalah sebesar 99,18%.

24. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada program ini terdapat tiga sasaran, yaitu terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial; meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; dan Terwujudnya Perlindungan Sosial dan Hukum. Capaian kinerja indikator kinerja Pelatihan TAGANA sebesar 99,43%, Paket Bantuan Darurat Lauk Pauk *(Buffer Stock)* dengan capaian kinerja 97,41%, Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi Gakin dengan capaian kinerja 100%, serta Jejaring Kerja Penanganan KTK dan PM di Kab/Kota dan Kecamatan dengan capaian kinerja 95%. Rata-rata capaian kinerja Program Perllindungan dan Jaminan Sosial adalah sebesar 97,96%.

25. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Sasaran program ini terdiri dari Meningkatnya Akses RTM terhadap layanan permodalan usaha dan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Perempuan. Target indikator Rasio Jumlah RTM yang akses terhadap layanan modal usaha (target RTM 205.198) sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, Pemetaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 180 KK dengan realisasi sebanyak 180 KK dan target indikator Pemetaan Fakir Miskin (FM) sebanyak 550 KK dengan realisasi 550 KK.

Berdasarkan hasil capaian indikator-indikator tersebut diatas, maka rata-rata capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin adalah sebesar 100%.

26. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program ini memiliki dua sasaran. Sasaran yang pertama, yaitu Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dengan dua indikator kinerja, yaitu Pola Pelaksanaan Aksi Afirmasi PKHP dan indikator RAD PKHP dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100%.

Sasaran kedua, yaitu Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan dengan target sebesar 90,00% dan realisasi sebesar 89,80%. Rata-rata capaian kinerja Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan anak adalah sebesar 99,93%.

C. Agenda Perekonomian

Untuk menilai kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada agenda perekonomian, kita akan menghitung nilai capaian kinerja Program-program yang diselenggarakan pada agenda Perekonomian adalah :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sasaran Program ini adalah terciptanya Kemampuan memanfaatkan ketersedian Pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indek Tingkat Kerentanan Pangan, nilai capaiannya 99,57%, Rasio Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan, nilai capaiannya 97,32%, Rasio Ketersediaan Pangan Daerah, nilai capaiannya 99,59%, Rasio Akses Pangan dan Pendapatan Masyarakat, nilai capaiannya 98,57%, Tingkat konsumsi Ikan, nilai capaiannya 110,80% (target 25 Kg/Kapita, realisasi 27,7 Kg/Kapita)

Berdasarkan hal diatas, dengan menggunakan lima indikator pengukuran, rata-rata nilai capaian kinerja program peningkatan ketahanan pangan adalah sebesar 101,17%.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Agribisnis

Sasaran Program ini adalah Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Keberdayaan Petani Pembudidayaan dan

Nelayan. Berdasarkan lima indikator, yaitu Produksi dan produktivitas holtikultura nilai capaiannya 100%, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan, nilai capaiannya 100% (Target 13,50% realisasi 13,50%. Peningkatan ekspor perikanan 554,35% (target 255 ton realisasi 1413,6 ton). Luas Pengembangan dan rehabilitasi hutan capaian kinerjanya 100%, pengamanan dan pengendalian kawasan hutan dan kebun 100%. Rata-rata nilai capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan agribisnis sebesar 190,87%. Ada dua sasaran yang dicapai dalam program ini yaitu :

a. Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Perikanan; Keberdayaan Petani Pembudidayaan & Nelayan

   Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini,ada tiga indikator capaian kinerja yang digunakan, yaitu Produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan nilai capaian 97,50%, Produksi dan produktivitas holtikultura nilai capaian sebesar 97,86%, (Target 1,40% dan realisasi 1,37%), Peningkatan ekspor perikanan capaian sebesar 100%. Rata–rata nilai capaian sasaran peningkatan pemerataan/penempatan sumber daya aparatur adalah 98,45%.

b. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan

   Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, ada dua indikator capaian kinerja yang digunakan, yaitu Produktivitas dan Produksi Tanaman Perkebunan pada tahun 2012 dengan target sebesar 15,00% realisasi sebesar 14,71% dengan capaian kinerja sebesar 98,07% dan Luas Pengembangan dan Rehablitasi Lahan Tanaman Perkebunan dengan target sebesar 750 Ha realisasi sebesar 750 Ha, sehingga nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%.

   Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rata-rata nilai capaian kinerja program Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan sebesar 99,03%.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan

Sasaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan adalah peningkatan pendapatan pembudidayaan dan nelayan. Indikator kinerja yang digunakan adalah Produksi Perikanan

nilai capaian kinerja sebesar 74,51% (target 210.033,30 ton dan realisasi 156.489 ton). Luas lahan yang dikonservasi 100% (target 1 Ha dan realisasi 1 Ha). Penyerapan tenaga kerja perikanan capaian kinerja sebesar 102,50% (target sebanyak 80.000 orang dan realisasi sebanyak 82.000 orang). Nilai tukar nelayan dan pembudidaya 85,89% (target sebesar 115% dan realisasi sebesar 98,77%). Penyelesaian kasus pelanggaran kelautan dan perikanan capaian kinerja sebesar 100% (target 12 kasus dan realisasi 12 kasus).

Berdasarkan lima indikator tersebut, maka rata-rata nilai capaian kinerja program pengolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan adalah sebesar 92,58%.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Hutan

Sasaran yang hendak dicapai pada program ini, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan disekitar hutan. Indikator kinerja yang digunakan adalah Pembinaan Industri Hasil Kehutanan capaian kinerja sebesar 100% (target 160 buah dan realisasi 160 buah). Penertiban dan Peredaran Hasil Hutan (Penataan Hasil Hutan) capaian kinerja sebesar 100% (target 8 Kab/Kota dan realisasi 8 Kab/Kota). Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan sekitar Hutan capaian kinerja sebesar 100% (target 39,61% dan realisasi 39,61%).

Berdasarkan tiga Indikator kinerja diperoleh rata-rata capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sumberdaya hutan adalah sebesar 100%.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah

Ada empat sasaran yang hendak dicapai pada program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah yaitu meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, Berkembangnya Destinasi Pariwisata, Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata, Meningkatnya kemitraan pariwisata Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Pelaksanan Sosialisasi 100% (target 5 dan realisasi 5), Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan sebesar 87,50% (target 16 dan realisasi 14), Jumlah Kemitraan dengan Usaha Jasa Pariwisata capaian kinerja sebesar 100% (target 5 dan realisasi 5), Jumlah

Pelaksanaan Event/Promosi capaian kinerja sebesar 100% (target 5 dan realisasi 5).

Berdasarkan empat indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan pariwisata Daerah adalah sebesar 96,88%.

6. Program Peningkatan Investasi Dunia usaha

Dua sasaran dalam peyelenggaraan program ini adalah meningkatnya minat dan realisasi investasi; dan meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi; memelihara dan fasilitasi investasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah Peningkatan Volume Peraturan daerah dengan capaian kinerja 100% (target 7,00% dan realisasi 7,00%) Peningkatan Pelayanan Masyarakat capaian kinerja sebesar 100% (target 8,50% realisasi 8,50%), Peningkatan Promosi Peraturan daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% (target 3,90% dan realisasi 4,0%) dan Nilai Investasi Penanaman Modal PMA/PMDN dan Jumlah Proyek PMA/PMDN dengan capaian kinerja sebesar 255% (Target Rp.11.578.947.368.421,- dengan realisasi sebesar Rp.29.513.997.000.000,-).

Berdasarkan empat indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capain kinerja program Peningkatan Investasi Dunia Usaha adalah sebesar 150,80%.

7. Program Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu-Hilir

Ada tiga sasaran pada program Peningkatan Pada Hubungan Kemitraan Industri Hulu-Hilir yaitu Meningkatkan Penerapan dan Pengembangan IPTEK dan Kompetensi industri serta aspek kemasan HAKI bagi IKM; meningkatnya kualitas dan keragaman serta diversifikasi produk-produk IKM ciri khas daerah; Terciptanya iklim yang kondusif terhadap pengembangan klaster industri potensial (TPT, Alas kaki, petrokimia, logam dan mesin) di Provinsi Banten. Indikator kinerja yang digunakan adalah Peningkatan Produktifitas Industri capaian kinerja sebesar 100% (target 6,50% dan realisasi 6,50%), Pengembangan klaster industri potensial dengan capaian sebesar 100% (target 4,50% dan realisasi 4,50%) dan Peningkatan Produksi IKM capaian sebesar 99,75% (target 8,00% dengan realisasi 7,98%).

Berdasarkan tiga indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capain kinerja program Peningkatan Hubungan Kemitraan Industri Hulu-Hilir adalah sebesar 99,92%.

8. **Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan K-UMKM**

   Sasaran program pengembangan dan kelembagaan K-UMKM adalah pengembangan lingkungan usaha; fasilitasi pembiayaan dan pemasaran; pengembangan kewiraan usaha dan SDM dan setara bisnis UMKM. Indikator yang digunakan Pengembangan lingkungan Usaha sebesar 100% (target 2,31% dan realisasi 2,31%), fasilitas Pembiayaan sebesar 100% (target 7% realisasi 7%).

   Berdasarkan dua indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capain kinerja program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan K-UMKM adalah sebesar 100%.

9. **Program Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha**

   Sasaran dari program ini adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,5% pada akhir tahun 2012, dengan indikator kinerja : Rasio jumlah pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Angkatan kerja, dengan target kinerja 11,48% realisasinya 10,13%, dengan demikian nilai capaian kinerja program ini adalah sebesar 103,38%.

   Berdasarkan nilai capaian kinerja 9 (sembilan) program yang diselenggarakan pada agenda perekonomian diatas, maka rata-rata nilai capaian kinerja agenda perekonomian adalah sebesar 103,92%.

10. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja**

    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui sasaran peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja TK yang diukur melalui Rasio Tenaga Kerja (TK) yang terampil dan terlatih.

    Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang diukur oleh indikator kinerja rasio tenaga kerja (TK) yang terampil dan terlatih, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja di Provinsi Banten tahun 2012 rata-rata sebesar 94,99%.

D. Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah

Untuk menilai kineja Pemerintah Provinsi Banten pada Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah, kita akan menghitung nilai capaian kinerja Program-Program yang diselenggarakan pada Agenda ini yaitu:

1. **Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

   Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas jalan dan jembatan pada kondisi mantap 80-90% (rata-rata pada ruas jalan Provinsi dan Kab/Kota) dengan prioritas penangan pada kawasan strategis (industri dan pariwisata). Untuk mengukur kinerja program ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Ruas Jalan & Jembatan dalam Kondisi Mantap di WKP I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) dengan capaian kinerja sebesar 96,58% (target 97,21% dan realisasi 93,89%), Rasio Ruas Jalan & Jembatan dalam Kondisi Mantap di WKP II (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon) dengan capaian kinerja sebesar 77,89% (target 98,52% dan realisasi 76,74%), Rasio Ruas Jalan & Jembatan dalam Kondisi Mantap di WKP III (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) dengan capaian kinerja sebesar 97,84% (target 80,08% dan realisasi 79,13%). Sehingga rata-rata nilai capaian program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebesar 90,77%.

2. **Program Pengembangan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi**

   Ada tiga sasaran dalam penyelenggaraan program pengembangan transportasi, pos dan telekomunikasi, yaitu (1) Meningkatnya penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika dengan aksesibilitas serta kapasitas yang memadai (2) Meningkatnya penyelenggaraan transportasi yang terpadu, aman, tertib, ramah lingkungan; (3) Meningkatnya peyediaan fasilitas Transportasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Transportasi nilai capaian sebesar 97,02% (target 12,10% dan realisasi 11,74%), Rasio Pembinaan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi capaian kinerja sebesar 93,78% (target 11,58% dan realisasi 10,86%), Rasio Pengembangan Telematika dan Informatika capaian kinerja sebesar 98,39% (target 6,20% dengan realisasi 6,10%), Rasio Penyediaan

Fasilitas Perhubungan Darat capaian kinerjaini sebesar 93,44% (target 8,69% dan realisasi 8,12%), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Laut capaian kinerja sebesar 94,07% (target 3,37% dan realisasi 3,17%), Rasio Penyediaan Fasilitas Perhubungan Udara capaiann kinerja sebesar 78,69% (target 5,21% realisasi 4,10%). Berdasarkan enam indikator penilaian di atas, rata-rata nilai capaian kinerja program pengembangan transportasi, Pos dan Telekomunikasi adalah sebesar 92,41%.

3. **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air**

   Sasaran dalam program ini adalah meningkatnya fungsi dan pelayanan irigasi teknis yang mendukung sektor pertanian. Indikator kinerjanya adalah rasio rehabilitasi irigasi teknis di WKP II dan III dengan capaian kinerja sebesar 93,14% (target kinerja 75% dan realisasi 69,85%).

4. **Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Kawasan Sentra Produksi**

   Sasaran dalam program ini adalah meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki rumah/tempat tinggal serta berkurangnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan layanan air bersih dan pelayanan sanitasi lingkungan. Indikator kinerja adalah rasio keluarga yang belum memiliki rumah/tempat tinggal dengan capaian kinerja sebesar 100% (target 15% dan realisasi 15%), rasio rumah tangga yang dilayani air bersih dengan capaian kinerja sebesar 100% (target 32,5% dan realisasi 32,5%) dan rasio pembangunan jalan akses pusat pertumbuhan di WKP I, II dan III dengan capaian kinerja sebesar 99,11% (target 80,35% dan realisasi 79,63%).

5. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam**

   Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30% luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah dan Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam adalah sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini. Indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah dengan capaian kinerja sebesar 97,70% (target 23,50% dan realisasi 22,96%) dan

Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 97,16% (target 25,00% dan capaian 24,29%).

Berdasarkan dua indikator penilaian diatas, rata-rata nilai capaian kinerja program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam adalah sebesar 97,43%.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik (ABM50), Meningkatnya pentaatan Hukum lingkungan hidup oleh pelaku dan atau kegiatan dan pengembangan sistem insentip dan disinsetip terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan merupakan sasaran program ini. Indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Dokumen Lingkungan terhadap Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dengan capaian kinerja sebesar 100% (target 16,67% dan realisasi 16,67%), Rasio Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat akibat dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 99,50% (target 20,00% dan realisasi 19,90%), Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 industri) dengan capaian kinerja sebesar 97,06% (target 16,67 dan realisasi 16,18). Rasio Insentif dan Disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 100% (target 10,00% dan realisasi 10,00%), Berdasarkan 6 (enam) indikator penilain diatas, rata-rata nilai capaian kinerja program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup adalah sebesar 98,85%.

7. Program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi

Ada lima sasaran yang hendak dicapai dalam program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi, yaitu :

a. meningkatnya pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan;
b. meningkatnya pengembangan bidang pertambangan dan geologi;
c. meningkatanya pengusahaan bidang pertambangan dan energi;

d. ketersediaan sarana prasarana aparatur pemerintah yang memadai.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja program ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Terbarukan dengan capaian kinerja sebesar 97,67% (realisasi 18,84% dan target 19,29%); Rasio Pemanfaatan dan Pengembangan Migas dengan capaian kinerja sebesar 92,76% (realisasi 9,10% dan target 9,81%); Rasio Pengembangan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten dengan capaian kinerja sebesar 83,34% (realisasi 45,26% dan target 54,31%); Rasio Jumlah Pemetaan Potensi Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas bumi Rasio Jumlah Wilayah Perusahaan Pertambangan yang Terpetakan dengan capaian kinerja sebesar 97,68% (realisasi 25,28% dan target 25,28%); Rasio Pengolahan Air Tanah dan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 100% (realisasi 61,25% dan target 61,25%), Rasio Wilayah perusahaan pertambangan yang terpetakan dengan capaian kinerja sebesar 100% (target 30,10% dan realisasi 30,10%). Dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator penilaian diatas, rata-rata nilai capaian kinerja program Pengembangan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi adalah sebesar 94,97%.

8. Program Penataan Ruang

Sasaran dari Program Penataan ruang di Provinsi Banten tahun 2012 adalah Meningkatnya Fungsi Koordinasi dan Perencanaan Penataan Ruang Daerah, dan Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi. Indikator kinerja ini adalah: Rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang sudah ada terhadap Jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang direncanakan) dan Rasio Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian Ruang.

Target rasio Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang sudah ada terhadap jumlah Dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kawasan yang direcanakan) Pada tahun 2012 adalah sebesar 21,40% dan terealisasi sebesar 21,01%, sehingga nilai capaian kinerja sebesar 98,18%. Target Rasio Jumlah Rekomendasi Gubernur tentang Pengendalian 2 (dua)

Dokumen terealisasi 2 (dua) Dokumen. Dengan demikian nilai capaian kinerja ini sebesar 100%.

Rata-rata nilai capaian kinerja program penataan ruang adalah sebesar 100%. Berdasarkan nilai capaian kinerja 8 (delapan) program yang diselenggarakan pada Agenda Pengembangan Kawasan/Wilayah diatas, maka rata-rata nilai capaian kinerja adalah sebesar 95,09%.

2.2. Evaluasi Triwulanan 2 Tahun berjalan (Tahun 2013).

Berdasarkan laporan triwulanan yang disampaikan SKPD kepada BAPPEDA, maka dapat diperoleh hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Pekerjaan Umum : Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

   Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan total anggaran sebesar Rp.975.215.327.850,- (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Indikator program ini adalah prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap dan prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 43,54% dengan realisasi kinerja sebesar 9,94%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 23,05%;

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

   Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten adalah SKPD melaksanakan program ini dengan indikator Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi dan Luas layanan peningkatan dan rehabilitas jaringan irigasi teknis. Alokasi anggaran untuk program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebesar Rp.140.541.713.000,- (seratus empat puluh milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 50,61% dengan realisasi kinerja sebesar 20,90%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 40,82%.

3. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

   Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan dengan total anggaran sebesar Rp.251.114.500.000,- (dua ratus lima puluh

satu milyar seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Indikator program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kelurahan dan penyelesaian Gedung KP3B. Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 28,50% dengan realisasi kinerja sebesar 6,92%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 24,29%;

4. Perhubungan : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

   Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah SKPD melaksanakan program ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasasara lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 dan Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017. Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian adalah sebesar Rp.9.679.313.000,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 50,67% dengan realisasi kinerja sebesar 19,40%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 37,80%.

5. Program Pembinaan dan Penataan Perumahan (Perumahan)

   Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dengan total anggaran sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah), Indikator program ini adalah Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan. Target kinerja program ini pada Triwulan II adalah sebesar 36,42% dengan realisasi kinerja sebesar 3,25%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 8,91%;

6. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan (Penataan Ruang)

   Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan adalah Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah dan Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun. Alokasi anggaran untuk program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan adalah sebesar Rp.2.440.492.150,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh

rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 59,43% dengan realisasi kinerja sebesar 19,22%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 18,67%.

7. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Lingkungan)

   Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten adalah SKPD melaksanakan program ini, sedangkan indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM dan Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian adalah sebesar Rp.5.052.000.000,- (lima milyar lima puluh dua juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 59,43% dengan realisasi kinerja sebesar 11,42%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 19,22%.

8. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

   Program memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha) serta Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung, SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Alokasi anggaran untuk program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 62,27% dengan realisasi kinerja sebesar 44,93%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 71,97%.

9. Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi (ESDM)

   Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang dan Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi adalah sebesar Rp.38.691.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan

puluh satu juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 73,62% dengan realisasi kinerja sebesar 24,79%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 33,67%.

10. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

    Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi adalah sebesar Rp.6.837.000.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 33,61% dengan realisasi kinerja sebesar 16,17%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 48,11%.

11. Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi

    Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (izin) dan Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit), SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp.1.552.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 61,33% dengan realisasi kinerja sebesar 52,90%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 86,25%.

12. Program Ketahanan Pangan Masyarakat (Ketahanan Pangan)

    Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton), Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (Ton), Jumlah Lembaga Cadangan Pangan

Pemerintah Provinsi (Lembaga), Jumlah Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (Lembaga), Cakupan Layanan Fasilitasi Program Bantuan Raskin (%), Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH) dan Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Alokasi anggaran untuk Program Ketahanan Pangan Masyarakat adalah sebesar Rp.2.760.000.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 46,06% dengan realisasi kinerja sebesar 22,24%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 48,27%.

13. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

    Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial dan Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin adalah sebesar Rp.5.425.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 31,49% dengan realisasi kinerja sebesar 17,28%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 54,87%.

14. Program Rehabilitasi Sosial

    Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi, Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi, Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi, Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi, Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS) dan Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Rehabilitasi Sosial adalah sebesar Rp.6.086.000.000,- (enam milyar delapan puluh enam juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 56,34% dengan realisasi kinerja sebesar 38,39%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 68,14%.

15. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi, Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih, dan Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Rehabilitasi Sosial adalah sebesar Rp.5.512.000.000,- (lima milyar lima ratus dua belas juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 50,67% dengan realisasi kinerja sebesar 34,88%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 69,31%.

16. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan, Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan adalah sebesar Rp.34.361.018.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 35,47% dengan realisasi kinerja sebesar 7,55%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 21,29%.

17. Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan, Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Sosial Provinsi Banten

dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan adalah sebesar Rp.34.361.018.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 35,47% dengan realisasi kinerja sebesar 7,55%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 21,29%.

18. Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha

    Program ini memiliki satu indikator kinerja yang digunakan, yaitu Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnya. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha adalah sebesar Rp.3.368.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 51,33% dengan realisasi kinerja sebesar 11,53%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 22,46%.

19. Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

    Program ini memiliki satu indikator kinerja yang digunakan, yaitu Meningkatnya Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 71,88% dengan realisasi kinerja sebesar 23,09%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 32,13%.

20. Program Peningkatan Iklim Investasi (Penanaman Modal)

    Program ini memiliki satu indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPMT) Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Iklim Investasi adalah

sebesar Rp.2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 66,47% dengan realisasi kinerja sebesar 14,58%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 21,94%.

21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

    Program ini memiliki dua indikator kinerja yang digunakan, yaitu Nilai Realisasi Investasi PMA dan Nilai Realisasi Investasi PMDN. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPMT) Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi adalah sebesar Rp.5.700.000.000,- (lima milyar tujuh ratus juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 82,30% dengan realisasi kinerja sebesar 6,89%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 8,38%.

22. Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

    Program ini memiliki dua indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan dan Nilai Realisasi Investasi PMDN dan Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM adalah sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 62,57% dengan realisasi kinerja sebesar 46,90%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 74,96%.

23. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

    Program ini memiliki satu indikator kinerja yang digunakan, yaitu Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) dan Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM adalah sebesar Rp.2.170.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada

triwulan II adalah sebesar 47,25% dengan realisasi kinerja sebesar 16,31%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 34,52%.

24. Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

    Program ini memiliki dua indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UMKM (%) dan Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha K-UMKM (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM adalah sebesar Rp.2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 57,30% dengan realisasi kinerja sebesar 26,36%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 44,57%.

25. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

    Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Penurunan jumlah kasus zoonosis (AI, rabies, Brucellosis), Peningkatan Produksi Padi (GKG), Penyediaan Benih Sumber Padi (ha), Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi, Produksi Daging (sapi dan kerbau), Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan, Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata), Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Nilai Tukar Nelayan, Jumlah Produksi Benih Ikan dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan adalah sebesar Rp.21.305.940.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 46,04% dengan realisasi kinerja sebesar 22,16%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 48,13%.

26. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

    Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (Unit), Nilai Tukar Petani (NTP), Cakupan Penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP)/*Standard Operational Procedure* (SOP) Hortikultura (unit), Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan, Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan, Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB, Jumlah Ekspor Perikanan dan Tingkat Kosumsi Ikan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan adalah sebesar Rp.3.573.400.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 49,97% dengan realisasi kinerja sebesar 42,39%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 84,82%.

27. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

    Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian, Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan dan Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan adalah sebesar Rp.8.580.900.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 51,47% dengan realisasi kinerja sebesar 38,31%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 74,44%.

28. Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan ketersediaan Taktor, Cakupan ketersediaan *Rice Milling Unit* (RMU) dan Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Hampir sama dengan indikator kinerja program SDAP). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian adalah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 27,94% dengan realisasi kinerja sebesar 26,75%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 95,75%.

29. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (Pariwisata)

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata, Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata dan Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata adalah sebesar Rp.4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 44,89% dengan realisasi kinerja sebesar 11,14%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 24,82%.

30. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah, Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata dan Rasio peningkatan kapasitas sumber sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan instansi lainnya. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan adalah sebesar Rp.4.770.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar

44,36% dengan realisasi kinerja sebesar 21,21%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 47,82%.

31. Program Peningkatan Daya Saing Industri

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri, Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri, Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk dan Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Daya Saing Industri adalah sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 62,47% dengan realisasi kinerja sebesar 43,33%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 69,35%.

32. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional dan Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan adalah sebesar Rp.2.511.700.000,- (dua milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 68,07% dengan realisasi kinerja sebesar 46,57%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 68,41%.

33. Program Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Luas Areal Konservasi Laut dan Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau adalah sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar

52,93% dengan realisasi kinerja sebesar 25,25%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 47,70%.

34. Program Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan
Program ini memiliki beberapa indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan adalah sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 57,16% dengan realisasi kinerja sebesar 31,74%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 55,53%.

35. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Pendidikan)
Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebesar Rp.11.148.590.500,- (sebelas milyar seratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 31,14% dengan realisasi kinerja sebesar 3,71%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 11,91%.

36. Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun adalah sebesar Rp.50.529.859.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 21,18% dengan realisasi kinerja sebesar 2,94%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 13,88%.

37. Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar 12 Tahun adalah sebesar Rp.92.733.856.605,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 55,12% dengan realisasi kinerja sebesar 1,40%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 2,54%

38. Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi Minimum S1/D4 Terhadap Jumlah Guru Keseluruhan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebesar Rp.28.631.417.000,00,- (dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 39,20% dengan realisasi kinerja sebesar 39,89%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 101,75%.

39. Pendidikan Tinggi

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pendidikan Tinggi adalah sebesar Rp.8.740.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 17,24% dengan realisasi kinerja sebesar 22,48%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 130,36%.

40. Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Angka Buta Aksara Usia 15 Tahun ke Atas. SKPD yang melaksanakan

program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi) adalah sebesar Rp.14.154.550.700,- (empat belas milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 91,17% dengan realisasi kinerja sebesar 27,15%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 29,78%.

41. Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (Tahun). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan adalah sebesar Rp.7.469.757.442,- (tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 61,43% dengan realisasi kinerja sebesar 30,20%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 49,16%.

42. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Tingkat Kunjungan Perpustakaan per hari (%), Meningkatnya Kunjungan ke Website BPAD (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Perpustakan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program (Perpustakaan) Pengembangan Minat dan Budaya Baca adalah sebesar Rp.1.267.099.600,- (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 62,05% dengan realisasi kinerja sebesar 29,63%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 47,75%.

43. Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan adalah sebesar

Rp.172.271.900,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 89,61% dengan realisasi kinerja sebesar 86,03%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 96,01%.

44. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S), Persentase Ibu bersalin yang ditolong Nakes terlatih (Cakupan PN) (%), Cakupan Neontal pertama (KNI). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kesehataan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program (Kesehatan) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak adalah sebesar Rp.14.808.507.100,- (empat belas milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh ribu seratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 12,40% dengan realisasi kinerja sebesar 0,56%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 4,55%.

45. Pembinaan Upaya Kesehatan

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase Rumah Tangga Melaksanakan perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Persentase RSUD dan RS Swasta yang melayani pasien penduduk miskin, Presentase RS yang melaksanakan PONEK(%), Persentase Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Provinsi dan Labkesda Provinsi Banten, Persentase Puskesmas Rawat Inap yang Mampu PONED. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kesehataan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan adalah sebesar Rp.253.739.304.850,- (dua ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 13,91% dengan realisasi kinerja sebesar 0,23%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 1,64%.

46. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Porsentase Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (*Universal Child Imunization*) dibawah 1 (satu) tahun di Desa/Kelurahan, Prevalensi HIV(%), Persentase kasus baru

Tuberkulosis Paru(BTA Positif), Angka penemuan kasus Malaria per 1000 penduduk, Presentasi puskesmas yang melaksanakan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (%), Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah sebesar Rp.8.225.455.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 41,34% dengan realisasi kinerja sebesar 4,45%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 10,76%.

47. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%), Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan adalah sebesar Rp.23.015.486.650,- (dua puluh tiga milyar lima belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 0,80% dengan realisasi kinerja sebesar 0,51%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 64,05%.

48. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi, Terlaksananya Puskesmas yang melaksanakan SIKDA, Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit), Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa, Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan adalah sebesar Rp.4.822.504.500,- (empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah). Target

kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 19,42% dengan realisasi kinerja sebesar 4,85%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 24,98%.

49. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di RS Rujukan Provinsi Banten (%), Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja, Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat adalah sebesar Rp.14.455.406.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 27,06% dengan realisasi kinerja sebesar 4,36%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 16,11%.

50. (Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL), Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS), Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi), Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya), Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP, PPRG), Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (P2WKSS, GSI, APE). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 55,50% dengan realisasi kinerja sebesar 35,85%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 64,59%.

51. (Kepemudaan dan olah raga) Kepemudaan dan Kepramukaan

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Kelompok/Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel), Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit), Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Kepemudaan dan Kepramukaan adalah sebesar Rp.2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 23,76% dengan realisasi kinerja sebesar 10,88%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 45,79%.

52. Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%), Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga adalah sebesar Rp.4.823.510.500 (empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 61,27% dengan realisasi kinerja sebesar 11,44%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 18,68%.

53. Penataan Administrasi Kependudukan;

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%), SKPD yang melaksanakan program ini adalah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 70,87% dengan realisasi kinerja sebesar 20,92%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 29,53%.

54. Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat, Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal, Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya adalah sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 61,77% dengan realisasi kinerja sebesar 31,76%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 51,41%.

55. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Peningkatan integrasi pengelolaan layanan keluarga. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Kependudukan dan Keluarga Berencanaadalah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 73,41% dengan realisasi kinerja sebesar 71,82%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 97,83%.

56. Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan dan Kebutuhan Masyarakat Transmigrasi serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat, Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi adalah sebesar Rp.1.237.100.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II

adalah sebesar 42,04% dengan realisasi kinerja sebesar 9,39%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 22,11%.

57. Kerjasama Pembangunan Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk Program Kerjasama Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 45,69% dengan realisasi kinerja sebesar 24,43%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 53,48%.

58. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp.10.149.500.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 67,15% dengan realisasi kinerja sebesar 36,81%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 54,82%.

59. Pengendalian Pembangunan Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp.6.170.360.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 72,58% dengan realisasi kinerja sebesar 22,37%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 30,82%.

60. Komunikasi dan informatika, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Komunikasi dan informatika; Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah sebesar Rp.4.228.285.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 63,94% dengan realisasi kinerja sebesar 17,22%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 26,93%.

61. Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan Fasilitasi Administrasi Pertanahan Untuk Pelayanan Umum, Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa, Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten, Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi, Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi dan Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Seluruh SKPD Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian adalah sebesar Rp.20.230.414.000,- (dua puluh milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 62,85% dengan realisasi kinerja sebesar 29,24%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 46,53%.

62. Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah; Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan; Rasio Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. SKPD

yang melaksanakan program ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp.1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 50,00% dengan realisasi kinerja sebesar 36,84%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 73,68%.

63. Penanggulangan Bencana

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan yaitu Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana, Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana.dan Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Penanggulangan Bencana adalah sebesar Rp.5.346.984.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 58,73% dengan realisasi kinerja sebesar 36,81%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 54,82%.

64. Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan yaitu Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah dan Jumlah Kekayaan Daerah (Rp). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah adalah sebesar Rp.113.006.466.800,- (seratus tiga belas milyar enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 40,32% dengan realisasi kinerja sebesar 5,30%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 13,14%.

65. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Pendapatan Asli Daerah, Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/ informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit),

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit), Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp.22.728.454.200,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 44,66% dengan realisasi kinerja sebesar 16,23%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 36,35%.

66. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 77,23% dengan realisasi kinerja sebesar 48,15%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 62,35%.

67. Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten, Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur adalah sebesar Rp.5.505.000.000,- (lima milyar lima ratus lima juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar

62,25% dengan realisasi kinerja sebesar 33,94%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 54,53%.

68. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Diklat Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur adalah sebesar Rp.8.414.900.000,- (delapan milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 86,16% dengan realisasi kinerja sebesar 54,92%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 63,74%.

69. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Seluruh SKPD Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.59.973.748.950,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 59,46% dengan realisasi kinerja sebesar 29,40%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 49,46%.

70. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan, Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Seluruh SKPD Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur adalah sebesar Rp.321.126.354.603,- (tiga ratus dua puluh satu milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat

ribu enam ratus tiga rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 49,56% dengan realisasi kinerja sebesar 28,84%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 58,21%.

71. Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur adalah sebesar Rp.8.981.152.500,- (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 47,40% dengan realisasi kinerja sebesar 22,01%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 46,44%.

72. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah, Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD, Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD dan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daera adalah sebesar Rp.85.130.850.000,- (delapan puluh lima milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 61,38% dengan realisasi kinerja sebesar 23,04%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 37,53%.

73. Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%) dan Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM adalah

sebesar Rp.3.975.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 65,45% dengan realisasi kinerja sebesar 44,32%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 67,72%.

74. Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK adalah sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 54,83% dengan realisasi kinerja sebesar 27,87%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 50,84%.

75. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan yaitu Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Seluruh SKPD Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp.12.491.046.550,- (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 51,01% dengan realisasi kinerja sebesar 18,18%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 35,64%.

76. Pembinaan Kearsipan Daerah

    Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%) dan Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%). SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Kearsipan : Pembinaan Kearsipan Daerah adalah sebesar Rp.848.939.600,- (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh

sembilan ribu enam ratus rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 63,21% dengan realisasi kinerja sebesar 36,67%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 58,01%.

77. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Rasio Desa/Kel yang mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel, Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) dan Rasio pengembangan Pemerintahan Desa. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan adalah sebesar Rp.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 40,51% dengan realisasi kinerja sebesar 24,81%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 61,23%.

78. Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik

Program ini memiliki indikator kinerja yang digunakan, yaitu Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik, Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan dan Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah. SKPD yang melaksanakan program ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dsn Politik Provinsi Banten. Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp.4.492.112.450,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah). Target kinerja program ini pada triwulan II adalah sebesar 66,93% dengan realisasi kinerja sebesar 53,82%, sehingga capaian kinerja program ini adalah sebesar 80,41%.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM RKPD PERUBAHAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

3.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam merumuskan arah kebijakan keuangan daerah mendatang, perlu juga memperhatikan pokok-pokok kebijakan dan asumsi keuangan nasional tahun 2013, yaitu :

1. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan melanjutkan program-program stimulus fiskal guna mencapai target asumsi ekonomi makro nasional tahun 2013, antara lain :
   a. Defisit APBN 2013 diperkirakan sebesar 1,0% PDB;
   b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional diproyeksikan sebesar 7,0%;
   c. Inflasi pada angka 5,0%;
   d. Pengangguran terbuka 6,0-6,4%;
   e. Penduduk miskin 9,5-10,5%.
2. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.400 triliun sampai Rp1.600 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7% terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2% terhadap PDB;
3. Mempertahankan stimulus Belanja Negara melalui peningkatan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya;
4. Mempertahankan rasio anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar 20% dalam Belanja Negara.

Hasil analisis terhadap kondisi, tantangan dan prospek perekonomian baik ditingkat nasional maupun daerah menjadi pedoman dalam melakukan analisis dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan sebagaimana yang tergambar dalam Tabel 3.1 tentang struktur APBD TA. 2013 dan rancangan struktur APBD-P TA. 2013.

Tabel 3.1
Struktur APBD Provinsi Banten TA. 2013
dan Rancangan Struktur APBD-P Provinsi Banten TA. 2013

NO	URAIAN	APBD TA. 2013	P-APBD TA. 2013
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**5,718,700,741,000**	**6,202,824,027,000**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3,577,954,000,000**	**3,961,998,855,000**
1.1.1	Pajak Daerah	3,460,435,000,000	3,809,135,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	6,109,000,000	6,354,380,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	36,460,000,000	38,108,916,000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74,950,000,000	100,400,559,000
1.2	**Dana Perimbangan**	**1,088,577,051,000**	**1,184,979,932,000**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	457,361,000,000	553,763,881,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	617,081,101,000	617,081,101,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	14,134,950,000	14,134,950,000
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1,052,169,690,000**	**1,055,845,240,000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,650,000,000	5,400,000,000
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,046,519,690,000	1,050,445,240,000
2	**BELANJA DAERAH**	**6,052,003,241,000**	**6,342,538,228,639**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3,216,559,291,000**	**3,589,998,878,639**
2.1.1	Belanja Pegawai	431,461,364,000	478,036,364,000
2.1.2	Belanja Hibah	1,405,019,690,000	1,424,548,240,000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	70,000,000,000	92,000,000,000
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	1,210,988,237,000	1,404,664,274,639
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	89,090,000,000	185,750,000,000
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	5,000,000,000
2.2	**Belanja Langsung**	**2,835,443,950,000**	**2,752,539,350,000**
2.2.1	Belanja Pegawai	178,982,771,400	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,055,979,141,164	
2.2.3	Belanja Modal	1,600,482,037,436	
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(333,302,500,000)**	**(139,714,201,639)**
3	**PEMBIAYAAN**	**333,302,500,000**	**139,714,201,639**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**364,302,500,000**	**450,814,201,639**
3.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	364,302,500,000	450,814,201,639
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**31,000,000,000**	**311,100,000,000**
3.2.1	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:**	**31,000,000,000**	**311,100,000,000**
3.2.1.1	LPK/BPR	1,500,000,000	1,500,000,000
3.2.1.2	Bank Jabar-Banten Syari'ah	29,500,000,000	
3.2.1.3	PT. BGD (Bank Banten)		309,600,000,000
3.3	**Pembiayaan Netto**	**333,302,500,000**	**139,714,201,639**

Sumber : DPPKD Provinsi Banten

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian; (5 Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**. Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;

2. **Disiplin Anggaran**. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Arah kebijakan keuangan daerah memuat tentang arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

a. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

Asumsi target penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6-7%;

b) Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun sebesar 8,34%;

c) Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar 22,96% per tahun;

d) Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2013 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 4,7% ;

e) Kebijakan peningkatan penyertaan modal kepada lembaga-lembaga keuangan bank dan PT. Banten Global Development;

f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB);

g) Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan baru.

2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

a) Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%;

b) Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun.

b. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah

Beberapa pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui :

a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
b) Rasionalisasi pajak/retribusi daerah;
c) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta;
d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan.

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan.

Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah–langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target–target pendapatan dan langkah–langkah yang diperlukan untuk mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan.

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD TA. 2013 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang Peraturan Daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan;

c) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).

2) Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU TA. 2013 dengan memperhatikan realisasi TA. 2012;

b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan TA. 2013, dan memperhatikan realisasi DBH TA. 2012;

c) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN TA. 2013.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD TA. 2013, hal yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah TA. 2013 yang akan dilakukan adalah:

a) Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak daerah;
d) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
e) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan;

c. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.5.718.700.741.000,- sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.6.202.824.027.000,- meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.3.577.954.000.000,- sedangkan PAD pada APBD Perubahan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.3.961.998.855.000,-. Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :

   a) Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.3.460.435.000.000,- dan pada perubahan APBD Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.3.809.135.000.000,-;

b) Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.6.109.000.000,- sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.6.354.380.000,-;

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp.36.460.000.000,- sedangkan pada perubahan APBD Tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp.38.108.916.000,-; dan

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp.74.950.000.000,- sedangkan pada APBD-P ditargetkan sebesar Rp.100.400.559.000,-

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.088.577.051.000,-. Sedangkan pada APBD-P ditargetkan sebesar Rp.1.184.979.932.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp.457.361.000.000,- dan pada APBD-P sebesar Rp.553.763.881.000,-;

b) Dana Alokasi Umum pada APBD 2013 dan APBD-P yang ditargetkan sebesar Rp.617.081.101.000,-;

c) Dana Alokasi Khusus pada APBD 2013 dan APBD-P ditargetkan sebesar Rp.14.134.950.000,-.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.052.169.690.000,- sedangkan pada APBD-P ditargetkan sebesar Rp.1.055.845.240.000,- Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga sebesar Rp.5.650.000.000,-dan pada APBD-P ditargetkan sebesar Rp.5.400.000.000,- serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada APBD 2013 sebesar Rp.1.046.519.690.000,- dan pada APBD-P ditargetkan sebesar Rp.1.050.445.240.000,-.

d. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2013 sebagai berikut :

1) Peningkatan sarana dan prasarana, melalui:
   a) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung UPT yang representatif;
   b) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung di setiap UPT.
2) Peningkatan sumberdaya manusia, melalui:
   a) Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur;
   b) Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Samsat.
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui:
   a) Razia kendaraan bermotor;
   b) SAMSAT *door to door*;
   c) Sosialisasi pajak daerah melalui media cetak dan media elektronik;
   d) Penyuluhan pajak daerah di kecamatan-kecamatan;
   e) Koordinasi dengan instansi teknis terkait (SKPD penghasil, pertamina, produsen kendaraan bermotor, lembaga pembiayaan/leasing, kepolisian, dan jasa raharja).
4) Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat, melalui:
   a) Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama SAMSAT;
   b) SAMSAT keliling;
   c) Pembentukan gerai SAMSAT;
   d) Pembentukan SAMSAT drive thru;
   e) Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2002-2008, di seluruh UPT/Kantor Bersama SAMSAT;
   f) Layanan informasi pajak kendaraan bermotor melalui SMS (*Short Message Services*) dengan *provider.*
5) Peningkatan Sistem,melalui:
   a) Pembentukan sistem SAMSAT online;
   b) Pembentukan dan maintenance sistem aplikasi SAMSAT;
   c) Pembentukan sistem informasi pajak daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013,

Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp.6.052.003.241.000,- sedangkan Total Belanja Daerah dalam APBD-P Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp.6.342.538.228.639,-

Disamping itu adanya penyesuaian gaji dan tunjangan yang melekat sebesar 10% dari tahun sebelumnya serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan efektif lainnya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2013memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai
   a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas;

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013;

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

d) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan penganggaran belanja bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2013, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2012 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak

pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA. 2013.

4) Belanja Bantuan Keuangan.

   Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik.

5) Belanja Tidak Terduga

   Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan pembangunanakan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun 2013 dengan mendasarkan pada :

1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;
2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;
3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;
4) Capaian target *Pro job, Pro poor, Pro growth, Pro enviromental,* dan *MDG's;*
5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;
6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-daerah.

c. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2013 akan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2013. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan pemerintahan yang meliputi :

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Lingkungan hidup;
4) Pekerjaan umum;
5) Penataan ruang;
6) Perencanaan pembangunan;
7) Perumahan;
8) Kepemudaan dan olahraga;
9) Penanaman modal;
10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11) Kependudukan dan catatan sipil;
12) Ketenagakerjaan;
13) Ketahanan pangan;
14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16) Perhubungan;
17) Komunikasi dan informatika;
18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
21) Sosial;
22) kebudayaan;

23) Statistik;
24) Kearsipan
25) Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1) Kelautan dan perikanan;
2) Pertanian;
3) Kehutanan;
4) Energi dan sumber daya mineral;
5) Pariwisata;
6) Industri;
7) Perdagangan;
8) Ketransmigrasian.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Didalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2013 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Perubahan Provinsi Banten TA. 2013 bersumber dari penganggaran SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.364.302.500.000,-. Penganggaran tersebut harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA. 2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Kemudian pada Rancangan APBD Perubahan Provinsi Banten tahun 2013, penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.450.814.201.639,-

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan APBD Perubahan Provinsi Banten TA. 2013 sebagai berikut :

1) Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud (PT. BGD) dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), melalui penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LPK.

Proyeksi neraca APBD yang ditargetkan dalam APBD perubahan tahun 2013 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.202.824.027.000,-, sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp.6.342.538.228.639,-, mengalami defisit sebesar Rp.139.714.201.639,-, sehingga masih perlu diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan sebesar Rp.450.814.201.639,-.

Disamping itu di Tahun 2013 mendatang dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.311.100.000.000. Keseluruhan penyerataan modal tersebut merupakan penyertaan modal untuk menutupi sisa penyertaan modal yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Dalam struktur APBD Perubahan Tahun 2013, hampir semua SKPD mengalami penambahan pagu kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rancangan Belanja Langsung APBD Perubahan Tahun 2013 pada masing-masing SKPD di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rancangan Belanja Langsung P-APBD Provinsi Banten Tahun 2013

NO	SKPD PROVINSI BANTEN	APBD TA. 2013	P-APBD TA. 2013	(+/-)
1	Badan Kepegawaian Daerah	10,300,000,000	11,800,000,000	1,500,000,000
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,270,000,000	8,270,000,000	1,000,000,000
3	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	11,000,000,000	11,500,000,000	500,000,000
4	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	13,050,000,000	13,050,000,000	0
5	Badan Lingkungan Hidup Daerah	9,000,000,000	9,000,000,000	0
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa	13,000,000,000	13,500,000,000	500,000,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,150,000,000	9,400,000,000	250,000,000
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan	15,214,900,000	25,427,300,000	10,212,400,000
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10,500,000,000	11,400,000,000	900,000,000
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24,533,800,000	24,533,800,000	0
11	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	5,000,000,000	5,800,000,000	800,000,000
12	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	13,800,000,000	13,800,000,000	0

NO	SKPD PROVINSI BANTEN	APBD TA. 2013	P-APBD TA. 2013	(+/-)
13	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	5,930,000,000	10,930,000,000	5,000,000,000
14	Biro Hukum	4,500,000,000	5,000,000,000	500,000,000
15	Biro Kesejahteraan Rakyat	37,435,018,000	42,435,018,000	5,000,000,000
16	Biro Organisasi	3,750,000,000	4,250,000,000	500,000,000
17	Biro Pemerintahan	4,500,000,000	5,500,000,000	1,000,000,000
18	Biro Umum	79,735,500,000	89,735,500,000	10,000,000,000
19	Biro Perlengkapan dan Aset	127,367,466,800	141,367,466,800	14,000,000,000
20	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	61,977,185,200	74,227,185,200	12,250,000,000
21	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	1,018,269,000,000	872,269,000,000	(146,000,000,000)
22	Dinas Budaya dan Pariwisata	15,857,250,000	16,457,250,000	600,000,000
23	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	12,400,000,000	12,700,000,000	300,000,000
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	17,991,850,000	18,491,850,000	500,000,000
25	Dinas Kesehatan	352,736,434,000	312,361,385,000	(40,375,049,000)
26	Dinas Koperasi dan UMKM	10,450,000,000	10,750,000,000	300,000,000
27	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9,770,000,000	9,770,000,000	0
28	Dinas Pendidikan	247,000,000,000	225,000,000,000	(22,000,000,000)
29	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	17,104,320,000	18,754,320,000	1,650,000,000
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8,485,120,000	9,435,120,000	950,000,000

NO	SKPD PROVINSI BANTEN	APBD TA. 2013	P-APBD TA. 2013	(+/-)
31	Dinas Pertambangan dan Energi	52,683,800,000	52,683,800,000	0
32	Dinas Pertanian dan Peternakan	18,960,000,000	20,460,000,000	1,500,000,000
33	Dinas Sosial	24,150,000,000	25,950,000,000	1,800,000,000
34	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman	411,870,000,000	413,753,000,000	1,883,000,000
35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13,270,000,000	13,870,000,000	600,000,000
36	Inspektorat Provinsi	13,000,000,000	13,330,000,000	330,000,000
37	Kantor Penghubung	3,950,000,000	4,720,000,000	770,000,000
38	RSUD Malingping	7,982,306,000	7,982,306,000	0
39	Satuan Polisi Pamong Praja	6,000,000,000	7,500,000,000	1,500,000,000
40	Sekretariat DPRD	104,500,000,000	104,500,000,000	0
41	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	2,000,000,000	2,500,000,000	500,000,000
42	RSUD Banten	0	48,375,049,000	48,375,049,000
JUMLAH		**2,835,443,950,000**	**2,752,539,350,000**	**(82,904,600,000)**

Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013 dan indikator kegiatan beserta lokasi dan pagu indikatifnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

BUKU II
MATRIK PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2013

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				URUSAN WAJIB										
1	20			Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;										
1	20	1		Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum										
1	20	7		Program Pembinaan Karir dan Administrasi Kepegawaian Aparatur				5.505.000.000				6.565.000.000		
					Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten	Provinsi Banten	100%		APBD	Provinsi Banten	100%		APBD	
					Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (3,4)	Provinsi Banten	100%		APBD	Provinsi Banten	100%		APBD	
					Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (5,6,7)	Provinsi Banten	100%		APBD	Provinsi Banten	100%		APBD	
1	20	7	1	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten				400.000.000				400.000.000		
					Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS di Provinsi Banten	PNS Prov. Banten	16 Kasus		APBD	PNS Prov. Banten	16 Kasus		APBD	
					Penanganan Kasus Perceraian PNS di Provinsi Banten	PNS Prov. Banten	12 Kasus		APBD	PNS Prov. Banten	12 Kasus		APBD	
					Penanganan Kasus Perkawinan PNS di Provinsi Banten	PNS Prov. Banten	3 Kasus		APBD	PNS Prov. Banten	3 Kasus		APBD	
					Pembinaan Pegawai Pemerintah Provinsi Banten	PNS Prov. Banten	4 Kegiatan		APBD	PNS Prov. Banten	4 Kegiatan		APBD	
					Monitoring Kinerja PNS di Lingkungan Provinsi Banten	PNS Prov. Banten	1 Dokumen		APBD	PNS Prov. Banten	1 Dokumen		APBD	
					Penyusunan dan Pengolahan Laporan Rekapitulasi Absensi SKPD	1 Paket Dokumen	1 Paket Dokumen		APBD	1 Paket Dokumen	1 Paket Dokum		APBD	

1	20	7	2	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai				1.570.000.000				1.630.000.000		
					Pelaksanaan Kegiatan Medical Check Up Eselon I dan II	Cilegon	1 Kali Kegiatan		APBD	Cilegon	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Pelaksanaan Medical Check Up Eselon III	Cilegon	1 Kali Kegiatan		APBD	Cilegon	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Pelaksanaan Medical Check Up Eselon IV	Serang	1 Kali Kegiatan		APBD	Serang	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Pegawai	Serang	4 Kali Kegiatan		APBD	Serang	4 Kali Kegiatan		APBD	
					Fasilitasi Hari Besar Nasional (HUT RI)	Serang	1 Kegiatan		APBD	Serang	1 Kegiatan		APBD	
					Fasilitasi Hari Besar (Hut Banten)	Serang	1 Kegiatan		APBD	Serang	1 Kegiatan		APBD	
					Fasilitasi Hari Kesadaran Nasional	Serang	12 Kali Kegiatan		APBD	Serang	12 Kali Kegiatan		APBD	
					Pembinaan Mental Pegawai Eselon IV	Serang	1 Kegiatan		APBD	Serang	1 Kegiatan		APBD	
					Pembinaan Mental Pegawai Pelaksana	Serang	1 Kegiatan		APBD	Serang	1 Kegiatan		APBD	
					Pemberian Penghargaan / Tanda Kehormatan	Serang	150 Orang		APBD	Serang	150 Orang		APBD	
					Bantuan bagi Pegawai Yang Meninggal Dunia	Serang	10 Orang		APBD	Serang	10 Orang		APBD	
					Study Banding Pengembangan Wawasan Aparatur Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	Serang	1 Kali Kegiatan		APBD	Serang	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sosialisasi Peraturan-Peraturan Kesejahteraan Pegawai	Serang	1 Kali Kegiatan		APBD	Serang	1 Kali Kegiatan		APBD	
1	20	7	3	Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas				550.000.000				550.000.000		
					Inventarisasi PNS Provinsi BantenYang Memasuki BUP	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Inventarisasi PNS Yang Meninggal Dunia	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Inventarisasi Pensiun PNS Kab/Kota	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pemprosesan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Gol IV/c Keatas	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pemprosesan SK Presiden untuk Pensiun PNS Gol IV/c Keatas	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pemprosesan Pensiun BUP PNS Gol IV/b Kebawah	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pengurusan Pensiun MDA PNS Gol IV/b Kebawah	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pengurusan Pensiun MDA PNS Gol IV/c Keatas	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pemerosesan Pensiun APS PNS Kab Pandeglang dan Kab Lebak	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pemerosesan Pensiun APS PNS Kab Serang,Kota Serang dan Kota Cilegon	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	

					Pemerosesan Pensiun APS PNS Kab Tangerang,Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pembekalan Persiapan Masa Purna Tugas	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Inventarisasi Penataan Staf PNS Provinsi Banten	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Penataan Staf PNS Provinsi Banten	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Penempatan PNS Kab/Kota	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Penempatan PNS Luar Provinsi Banten	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pengurusan Juknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Dokumen		APBD	
					Pembuatan Aplikasi Pencatatan Mutasi Kepegawaian	Banten, JKT, BDG	1 Aplikasi		APBD	Banten, JKT, BDG	1 Aplikasi		APBD	
1	20	7	4	Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian				550.000.000				550.000.000		
					Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Banten Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	400 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	400 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Serang Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	180Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	180Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Pandeglang Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	100 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	100 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Lebak Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	190 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	190 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Tangerang Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	175 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	175 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Cilegon Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	58 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	58 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	95 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	95 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Serang Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	140 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	140 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Selatan Periode 1 April 2013	Provinsi Banten	150 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	150 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Banten Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	183 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	183 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Serang Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	175 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	175 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Pandeglang Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	100Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	100Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Lebak Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	150Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	150Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Tangerang Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	175 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	175 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Cilegon Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	47 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	47 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Periode 1Oktober 2013	Provinsi Banten	125 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	125 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat PNS Kota Serang Periode 1 Oktober 2013	Provinsi Banten	145 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	145 Surat Keputusan		APBD	

					Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang Selatan Periode 1Oktober 2013	Provinsi Banten	150 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	150 Surat Keputusan		APBD	
					Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2013	Provinsi Banten	275 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	275 Surat Keputusan		APBD	
					Penerbitan SK Pengangkatan CPNSD Provinsi Banten Tahun	Provinsi Banten	781 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	781 Surat Keputusan		APBD	
					Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijasah PNS Provinsi Banten Tahun 2013	Provinsi Banten	200 Surat Keputusan		APBD	Provinsi Banten	200 Surat Keputusan		APBD	
1	20	7	5	Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat				500.000.000				550.000.000		
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Pertama	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Kedua	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Ketiga	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Keempat	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Kelima	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Keenam	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Ketujuh	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Kedelapan	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Kesembilan	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Kesepuluh	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Kesebelas	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Jabatan Struktural Keduabelas	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Pertama	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Kedua	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Ketiga	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Keempat	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Kelima	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	

					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Keenam	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Ketujuh	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Kedelapan	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Kesembilan	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Kesepuluh	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Kesebelas	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Penilaian Calon Sekda/Pejabat Esselon II Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Usulan Keduabelas	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Kepangkatan Periode 01 April 2013	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Pertimbangan Kepangkatan Periode 01 Oktober 2013	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pertama	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kedua	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Perpanjangan Batas Usia Pensiun Ketiga	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Sidang Baperjakat Perpanjangan Batas Usia Pensiun Keempat	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Pelantikan Pejabat Struktural Pertama	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Pelantikan Pejabat Struktural Kedua	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Pelantikan Pejabat Struktural Ketiga	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pertama	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
					Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kedua	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan		APBD	
													APBD	
1	20	7	6	Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten				500.000.000				570.000.000		

					Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I	BKD Prov. Banten	50 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	50 Orang		APBD	
					Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat II	BKD Prov. Banten	50 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	50 Orang		APBD	
					Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2013 Se-Provinsi Banten	BKD Prov. Banten	430 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	430 Orang		APBD	
					Seleksi Psikologi Calon Praja IPDN	BKD Prov. Banten	430 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	430 Orang		APBD	
					Seleksi Kesehatan Calon Praja IPDN	BKD Prov. Banten	250 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	250 Orang		APBD	
					Seleksi Kesamaptaan Calon Praja IPDN	BKD Prov. Banten	250 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	250 Orang		APBD	
					Seleksi Akademis Calon Praja IPDN	BKD Prov. Banten	185 Orang		APBD	BKD Prov. Banten	185 Orang		APBD	
					Seleksi Pantaukhir Calon Praja IPDN	IPDN Jatinangor Jabar	40 Orang		APBD	IPDN Jatinangor Jabar	40 Orang		APBD	
					Pengiriman Peserta DIKLATPIM Tingkat II	Luar Prov. Banten	1 Orang		APBD	Luar Prov. Banten	1 Orang		APBD	
					Pengiriman Peserta DIKLATPIM Tingkat III	Prov. Banten	30 Orang		APBD	Prov. Banten	30 Orang		APBD	
					Pengiriman Peserta DIKLATPIM Tingkat IV	Prov. Banten	120 Orang		APBD	Prov. Banten	120 Orang		APBD	
					Beasiswa Tugas Belajar	Luar Prov. Banten /Dalam	2 Orang		APBD	Luar Prov. Banten /Dalam	2 Orang		APBD	
					Pengiriman Bintek,Diklat dan Semiloka	Luar Prov.Banten	11 Orang		APBD	Luar Prov.Banten	11 Orang		APBD	
1	20	7	7	Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)				435.000.000				1.135.000.000		
					Rakor penyusunan kebutuhan pegawai dengan SKPD Pemerintah Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		APBD	
					Penyusunan formasi CPNSD Provinsi Banten	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	
					Rakor penerimaan CPNSD dengan SKPD Pemerintah Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		APBD	
					Rakor pengembangan sumber daya aparatur dengan Kab/Kota se-Provinsi Banten dan SKPD Pemerintah Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		APBD	
					Pemberkasan CPNSD dari Tenaga honorer	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	
					Verifikasi berkas CPNSD dari tenaga honorer	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	
					Penyusunan usulan penetapan NIP CPNSD dari tenaga honorer	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	
					Penetapan NIP CPNSD dari tenaga Honorer	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	
					Penerimaan CPNSD dari tenaga honorer	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	Provinsi Banten	781 Orang		APBD	
1	23	1	1	Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian				500.000.000	APBD			500.000.000	APBD	

					Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD Se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	
					Penyusunan Laporan Triwulanan Kekuatan Pegawai Provinsi Banten	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	
					Penyusunan Daftar Triwulanan Nominatif Pegawai Provinsi Banten	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	
					Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2013	Provinsi Banten	1 Aplikasi		APBD	Provinsi Banten	1 Aplikasi		APBD	
					Pendataan Semesteran Kekuatan Pegawai Kabupaten /Kota Se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	2 Semester		APBD	Provinsi Banten	2 Semester		APBD	
					Validasi Data Semesteran Pegawai Per-SKPD Se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	2 Semester		APBD	Provinsi Banten	2 Semester		APBD	
					Evaluasi Validasi Data Pegawai per SKPD se Provinsi Banten	Provinsi Banten	2 Semester		APBD	Provinsi Banten	2 Semester		APBD	
					Up Grade Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Provinsi Banten	1 Kegiatan		APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan		APBD	
					Penyusunan Buku Statistik PNS Provinsi Banten dan Kabupaten / Kota Tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen		APBD	Provinsi Banten	1 Dokumen		APBD	
					Updeting Data Triwulanan Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK)	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	
					Layanan Informasi Triwulanan Kepegawaian Elektronik	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	
					Rekonsiliasi Data Triwulanan PNS Per-SKPD Provinbsi Banten	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	Provinsi Banten	4 Triwulan		APBD	
					Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengelola Data dan Informasi Kepegawaian	Denpasar	1 Kegiatan		APBD	Denpasar	1 Kegiatan		APBD	
					Sistem Aplikasi Pelayanan perkantoran	Provinsi Banten	1 Aplikasi		APBD	Provinsi Banten	1 Aplikasi		APBD	
1	23	1	2	Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian				500.000.000				680.000.000		
					Evaluasi dan pelaporan bulanan pengelolaan arsip kepegawaian Pemerintah Provinsi Banten	Serang	3900 Dokumen		APBD	Serang	3900 Dokumen		APBD	
					Verifikasi dan Validasi Arsip Digital Kepegawaian	Serang	250 Dokumen		APBD	Serang	250 Dokumen		APBD	
					Penatahusaan dan penyelesaian KARPEG pegawai Provinsi Banten	Provinsi Jawa Barat	200 Karpeg		APBD	Provinsi Jawa Barat	200 Karpeg		APBD	
					Penatahusaan dan penyelesaian KARIS pegawai Provinsi Banten	Provinsi Jawa Barat	100 Karis		APBD	Provinsi Jawa Barat	100 Karis		APBD	
					Penatahusaan dan penyelesaian KARSU pegawai Provinsi Banten	Provinsi Jawa Barat	100 Karsu		APBD	Provinsi Jawa Barat	100 Karsu		APBD	
					Pembuatan kartu tanda pengenal pegawai/ID Card pegawai Provinsi Banten	Serang	1000 KTTP		APBD	Serang	1000 KTTP		APBD	
					Rekonsiliasi dokumen kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Banten dengan BKN dan Kanreg III	BKN Jakarta dan Kanreg III BKN Bandung	1 Kali kegiatan		APBD	BKN Jakarta dan Kanreg III BKN Bandung	1 Kali kegiatan		APBD	

					Rekonsiliasi dalam rangka pendataan dan pengumpulan kelengkapan arsip dokumen kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Banten	Serang	1 Kali kegiatan		APBD	Serang	1 Kali kegiatan		APBD	
					Workshop penyusunan dan penilaian sasaran kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi	Serang	1 Kali kegiatan		APBD	Serang	1 Kali kegiatan		APBD	
1	20	8		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur					APBD				APBD	
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				1.055.000.000				1.270.000.000		
					Rasio dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		(100%) 12 Jenis Dok				(100%) 12 Jenis Dok			
					Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan		(100%) 6 Jenis Dok				(100%) 6 Jenis Dok			
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				225.000.000				275.000.000		
					Sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan anggaran internal BKD Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Pemeliharaan serta pengembangan aplikasi keuangan BKD	Provinsi Banten	1 Aplikasi			Provinsi Banten	1 Aplikasi			
					Pembinaan internal penatahusaan keuangan dan perpajakan bagi pelaksana teknis di lingkungan BKD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Penyusunan LRA akhir tahun BKD Provinsi Banten tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan neraca keuangan kegiatan BKD akhir tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan prognosis tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan Validasi data laporan keuangan	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK) kegiatan BKD	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan rekonsiliasi data SIAKU SKPD dengan DPKAD tahun	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Evaluasi dana hibah KORPRI tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan rekonsiliasi dana hibah dengan KORPRI tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan SPP,SPM,SP2D dan SPJ kegiatan BKD tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan rekonsiliasi kegiatan dilingkungan BKD tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Verifikasi SPJ kegiatan tahun BKD tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Inventarisasi keuangan kegiatan di lingkungan BKD tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Pemeliharaan sistem aplikasi gaji pada BKD	Provinsi Banten	1 Aplikasi			Provinsi Banten	1 Aplikasi			
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				830.000.000				995.000.000		

					Forum SKPD Bidang Kepegawaian Tahun 2013	PNS Prov. Banten	1 Kali Kegiatan			PNS Prov. Banten	1 Kali Kegiatan			
					Pengembangan Wawasan Aparatur Pengelola Kepegawaian	Medan Sumatera Utara	15 org/ medan			Medan Sumatera Utara	15 org/ medan			
					Penyusunan TAPKIN dan IKU BKD Tahun 2013	Prov. Banten	2 Dokumen			Prov. Banten	2 Dokumen			
					Fasilitasi dan KOOrdinasi dan Pengelolaan Kepegawaian Wilayah Kab Tangerang,Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Prov. Banten	1 Kali kegiatan			Prov. Banten	1 Kali kegiatan			
					Penyusunan LKPJ BKD Tahun 2012	Prov. Banten	5 Dokumen			Prov. Banten	5 Dokumen			
					Penyusunan LPPD BKD Tahun 2012	Prov. Banten	5 Dokumen			Prov. Banten	5 Dokumen			
					Penyusunan LAKIP BKD Tahun 2012	Prov. Banten	5 Dokumen			Prov. Banten	5 Dokumen			
					Penyusunan dan Penyelesaian TLHP BKD Tahun 2013	Prov. Banten	2 Dokumen			Prov. Banten	2 Dokumen			
					Pembinaan Internal Pelaporan Kegiatan Internal BKD	Prov. Banten	1 Kali Kegiatan			Prov. Banten	1 Kali Kegiatan			
					Up Grade Software Aplikasi Laporan Kegiatan BKD	Prov. Banten	1 Aplikasi			Prov. Banten	1 Aplikasi			
					Monitoring Pelaksanaan Kegiatan BKD Tahun 2013	Prov. Banten	4 Triwulan, 4 Dokumen			Prov. Banten	4 Triwulan, 4 Dokumen			
					Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan BKD	Prov. Banten	12 Bulan, 12 dokumen			Prov. Banten	12 Bulan, 12 dokumen			
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) BKD Tahun 2013	Prov. Banten	5 Dokumen			Prov. Banten	5 Dokumen			
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKD Tahun 2013	Prov. Banten	5 Dokumen			Prov. Banten	5 Dokumen			
					Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKD tahun 2014	Prov. Banten	5 Dokumen, 1 Kali Kegiatan			Prov. Banten	5 Dokumen, 1 Kali Kegiatan			
					Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD tahun 2014	Prov. Banten	5 Dokumen			Prov. Banten	5 Dokumen			
					Penyusunan Renja BKD Tahun 2014	Prov. Banten	5 Dokumen, 1 Kali kiegiatan			Prov. Banten	5 Dokumen, 1 Kali kiegiatan			
1	20	10		Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				3.690.000.000				3.915.000.000		
					Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan		100%				100%			
					Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah		100%				100%			
					Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		100%				100%			
					Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian		100%				100%			

1	20	10	1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				2.237.600.000				2.287.600.000		
					Operasional Perkantoran	Provinsi Banten	Honor satpam,Office Boy/Pramubakti dan pengemudi, kebutuhan alat - alat listrik dan elektronik, langganan telkom,air,surat kabar dan majalah,internet, kebutuhan ATK,pengadaan pakaian kerja,lapangan pramubakti,10 Stel, OB dan satpam 4 stel			Provinsi Banten	Honor satpam,Office Boy/Pramubakti dan pengemudi, kebutuhan alat - alat listrik dan elektronik, langganan telkom,air,surat kabar dan majalah,internet,kebutuhan ATK,pengadaan pakaian kerja,lapangan pramubakti,10 Stel, OB dan satpam 4 stel			
					Penyelenggaraan Penyampaian Informasi Daerah	Provinsi Banten	Tersedianya informasi bagi kalangan publik,			Provinsi Banten	Tersedianya informasi bagi kalangan publik,			
					Fasilitasi Kepegawaian di Lingkungan BKD Provinsi Banten	Provinsi Banten	Validasi absensi di lingkungan BKD provinsi Banten			Provinsi Banten	Validasi absensi di lingkungan BKD provinsi Banten			
1	19	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				707.050.000	APBD			757.050.000	APBD	
					Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Banten	Peralatan dan Perlengkapan kantor(AC,Komputer,Leptop,Dispenser, DLL)			Provinsi Banten	Peralatan dan Perlengkapan kantor(AC,Komputer,Leptop,Dispenser, DLL)			
					Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas	Provinsi Banten	Kebutuhan BBM dan kebutuhan Service (9 Kensdaraan Rosda 4 dan 19 kendaraan Roda 2)			Provinsi Banten	Kebutuhan BBM dan kebutuhan Service (9 Kensdaraan Rosda 4 dan 19 kendaraan Roda 2)			
1	20	10	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				545.350.000	APBD			670.350.000	APBD	

					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi Banten	Renovasi ruangan pelayanan BKD 1 Pintu (AC 4 Unit, Lemari Arsip 5 Unit, Filing Kabinet !0n Unit)				Provinsi Banten	Renovasi ruangan pelayanan BKD 1 Pintu (AC 4 Unit, Lemari Arsip 5 Unit, Filing Kabinet !0n Unit)			
1	20	10	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur				200.000.000	APBD			200.000.000	APBD	
					Pembinaan Mental Aparatur	Provinsi Banten	1 Kali kegiatan				Provinsi Banten	1 Kali kegiatan		
					Sosialisasi Penanganan Arsip danAdministrasi Surat	Provinsi Banten / Jawa Barat	1 Kali kegiatan				Provinsi Banten / Jawa Barat	1 Kali kegiatan		
1	23			Statistik;										
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah				50.000.000	APBD			50.000.000	APBD	
					Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan	Provinsi Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD		Provinsi Banten	1 Dokumen	50.000.000	APBD	
JUMLAH								10.300.000.000				11.800.000.000		

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				URUSAN WAJIB										
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH										
1	20	8		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Kediklatan dan Bintek Aparatur		100%	8.414.900.000				17.727.300.000		
					Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan Dan Bintek		100%				100%			
1	20	8	1	Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan		Pandeglang		650.000.000		Pandeglang		850.000.000		
					Penyusunan Jurnal Diklat		4 Edisi				4 Edisi			
					Updating Aplikasi Software Sistem Data Alumni Diklat		1 Paket				1 Paket			
					Bintek Media Pembelajaran Tingkat Ahli		1 Dokumen				1 Dok			
					Rapat Koordinasi Pembinaan Antar Lembaga Diklat Kabupaten Kota		1 Dokumen				72 Orang			
					Monitoring Dan Evaluasi Pasca Diklat Antar Lembaga Diklat Kab/ Kota		1 Dokumen				1 Dok			
					Kunjungan Kerja Ke Badan Diklat Provinsi Sumatra Barat		1 Dokumen				1 Dok			
					Cetak Sertifikat Peserta Diklat		1 Dokumen				1 Dok			
											50 Orang			
1	20	8	2	Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur		Pandeglang		530.000.000		Pandeglang		530.000.000		
					Terselenggaranya Penyusunan Modul Diklat Teknis Penyusunan APBD		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Penyusunan Kurikulum Silabi Diklat Teknis Penyusunan APBD		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Penyusunan Bank Soal Prajabatan Gol II dan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Evaluasi Pasca Penyelanggaran Diklat		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Pengembangan Bakat/Minat dan Potensi Diri		77 Orang				77 Orang			
1	20	8	3	Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten		Pandeglang		217.216.000		Pandeglang		217.216.000		
					Terselenggaranya Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se Provinsi Banten		40 Orang				40 Orang			
1	20	8	4	Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah						Pandeglang				

					Terselenggaranya Fasilitasi Pola Konstribusi Diklat Prajabatan Gol.						250 Orang			
					Terselenggaranya Fasilitasi Pola Konstribusi Diklat Prajabatan Gol. II dan Gol. I						250 Orang			
1	20	8	5	Diklat Struktural Bagi PNS Daerah	Diklat Struktural Bagi PNS Daerah	Pandeglang		3.147.834.000		Pandeglang		9.115.434.000		
					Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk. III		40 Peserta				40 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tk. IV		120 Orang				120 Orang			
					Terselenggaranya Fasilitasi Pola Konstribusi Diklat Kepemimpinan Tk. III						160 Orang			
					Terselenggaranya Fasilitasi Pola Konstribusi Diklat Kepemimpinan Tk. IV						120 Orang			
1	20	8	6	Diklat Teknis Penatausahaan Program		Pandeglang		650.000.000		Pandeglang		900.000.000		
					Terselenggaranya Diklat Keprotokolan		25 Orang				25 Orang			
					Terselenggaranya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah (Angkatan VII)		30 Orang				30 Orang			
					Terselenggaranya Diklat Teknis Training Of Course (TOC)		25 Orang				25 Orang			
					Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa PBJ		30 Orang				25 Orang			
1	20	8	7	Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja		Pandeglang		1.919.850.000		Pandeglang		2.310.900.000		
					Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan SOP Angkatan II		30 Peserta				30 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat Teknis Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah		30 Peserta				30 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat Teknis Informasi Terapan Angkatan II		30 Peserta				30 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat Penyusunan APBD Angkatan II		30 Peserta				30 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat Pembentukan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)		90 Orang				90 Orang			
					Terselenggaranya Diklat Pembentukan Auditor		70Orang				70 Orang			
											30 Org			
											42 Orang			
1	20	8	8	Diklat Prajabatan bagi Calon PNS Daerah								2.503.750.000		
					Terselenggaranya Diklat Teknis Penyuluh Hukum Pertanahan Kota Tangerang						41 Orang			
1	20	8	8	Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya		Pandeglang		650.000.000		Pandeglang		650.000.000		
					Terselenggaranya Diklat Manajemen Pengembangan Wisata		25 Peserta				25 Peserta			

					Terselenggaranya Diklat Analisis Kebutuhan Diklat		25 Peserta				25 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat TOT dan Sertifikasi Widyaiswara		24 Peserta				24 Peserta			
					Terselenggaranya Diklat Pemantapan Tupoksi Satpol PP		27 Peserta				27 Peserta			
1	20	8	9	Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah		Pandeglang		650.000.000		Pandeglang		650.000.000		
					Diklat Peningkatan Kompetensi Sekdes		80 Peserta				80 Peserta			
					Diklat Analisis Jabatan		80 Peserta				80 Peserta			
					Diklat Bidan Desa		40 Peserta				40 Peserta			
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100%	850.000.000				675.414.500		
					Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan		100%				100%			
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Pandeglang		200.000.000		Pandeglang		200.000.000		
					Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Badan Diklat		4 dokumen				4 dokumen			
					Terselenggaranya Laporan Keuangan Triwulan		4 Dokumen				4 Dokumen			
					Terselenggaranya Laporan Aset Badan Diklat		2 Dokumen				2 Dokumen			
					Terselenggaranya Updating Aplikasi Sistem Informasi Keuangan		1 Paket				1 Paket			
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Pandeglang		650.000.000		Pandeglang		475.414.500		
					Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Kediklatan		60 Orang				60 Orang			
					Terselenggaranya Penyusunan Revisi Renstra Badan Diklat		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Penyusunan Renja Badan Diklat		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Penyusunan SOP Badan Diklat (Sub Bagian Umum dan Kepeg)		30 Dok				1 Dokumen (30 SOP)			
					Terselenggaranya Penyusunan Lakip Badan Diklat		1 dok							
					Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan		1 Dok				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Penyusunan Laporan Akhir Tahun Badan Diklat		1 Dokumen				1 Dokumen			
											5 Dok (100 SOP)			
											4 Dokumen			
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				5.835.000.000				6.909.585.500		
					Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah		100%				100%			

					Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%			
					Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi		100%				100%			
1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Pandeglang		1.488.454.000		Pandeglang		2.563.039.500		
					Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		1 Paket/Th				1 Paket/Th			
					Tersedianya Sarana Asesment Center						1 Paket			
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Pandeglang		1.039.495.000		Pandeglang		1.039.495.000		
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor		1 Paket/Th				1 Paket/Th			
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Pandeglang		3.057.051.000		Pandeglang		3.057.051.000		
					Terselenggaranya Penyediaan Barang/Jasa Perkantoran		1 Paket/Th				1 Paket/Th			
1	20	10	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Pandeglang		250.000.000		Pandeglang		250.000.000		
					Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Widyaiswara		24 Orang				24 Orang			
					Terselenggaranya Seminar Karya Tulis Ilmiah		24 Orang				24 Orang			
					Terselenggaranya Pembinaan Kerohanian (Pengajian Rutin) dan PHBI		80 Orang				80 Orang			
					Terselenggaranya Pembinaan Olahraga		80 Orang				80 Orang			
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Rasio Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Badan Diklat		100%	115.000.000				115.000.000		
1	23	1	1	Penyedian Data Pembangunan		Pandeglang		115.000.000		Pandeglang		115.000.000		
					Terselenggaranya Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Penyusunan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Publik		1 Dokumen				1 Dokumen			
					Terselenggaranya Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Badan Diklat		1 Dokumen				1 Dokumen			
JUMLAH								15.214.900.000				25.427.300.000		

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				URUSAN WAJIB										
1	19			Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;										
1	19	1		Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik										
					Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%)									
1	19	1	1	Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten		Prov. Banten	100% tahun 2014	200.000.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	200.000.000	APBD	
1	19	1	2	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik		Prov. Banten	100% tahun 2014	1.091.747.700	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	1.865.747.700	APBD	
1	19	1	3	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Prov. Banten	100% tahun 2014	656.528.250	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	656.528.250	APBD	
								1.150.000.000				1.150.000.000		
1	19	1	4	Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan		Prov. Banten	100% tahun 2014	250.000.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	250.000.000	APBD	
1	19	1	5	Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Prov. Banten	100% tahun 2014	900.000.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	900.000.000	APBD	
					Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)									
1	19	1	6	Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik		Prov. Banten	100% tahun 2014	661.874.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	861.874.000	APBD	
1	19	1	7	Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing		Prov. Banten	100% tahun 2014	481.962.500	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	481.962.500	APBD	
1	19	1	8	Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi		Prov. Banten	100% tahun 2014	250.000.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	250.000.000	APBD	
1	20			Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian										
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah										
					Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan									
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesbangpol		Prov. Banten	100% tahun 2014	424.244.850	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	450.245.146	APBD	

					Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian & Evaluasi Laporan Keuangan									
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Prov. Banten	100% tahun 2014	112.559.700	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	84.519.404	APBD	
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur										
					Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan									
					Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah									
1	20	10	1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan Kesbangpol		Prov. Banten	100% tahun 2014	1.596.192.600	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	1.624.192.600	APBD	
					Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur									
1	20	10	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Prov. Banten	100% tahun 2014	56.700.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	28.700.000	APBD	
1	20	10	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Prov. Banten	100% tahun 2014	364.500.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	364.500.000	APBD	
					Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian									
1	20	10	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Prov. Banten	100% tahun 2014	73.690.400	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	101.730.400	APBD	
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah										
					Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)									
				Penyusunan Profil dan Database		Prov. Banten	100% tahun 2014	150.000.000	APBD	Prov. Banten	100% tahun 2014	150.000.000	APBD	
JUMLAH								7.270.000.000				8.270.000.000		

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				URUSAN WAJIB										
1	20			Otonomi daerah, pemerintahan umum, admisnistrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persediaan										
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah										
					Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi Banten	100%			Provinsi Banten	100%			
					Rasio dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi laporan Keuangan	Provinsi Banten	100%			Provinsi Banten	100%			
1	20	9	1	Kegiatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan BPPMD Provinsi Banten	penyusunan Renja	Provinsi Banten	1 Dokumen	500.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Dokumen	500.000.000	APBD	
					Penyusunan RKA	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan DPPA	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan LAKIP	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan Bahan LPPD	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Penyusunan RKT	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Pengendalian Program dan Kegiatan	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Evaluasi Program dan Kegiatan	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Koordinasi Program dan kegiatan BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	20	9	2	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan BPPMD	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan BPPMD	Provinsi Banten	1 Dokumen	150.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Dokumen	150.000.000	APBD	
					Bintek Penyusunan laporan Keuangan bagi Aparatur BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Penyelesaian Tindak lanjut hasil Pemeriksaan	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Penyusunan Laporan Aset BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	20	10		Peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur										
					Rasio penyediaan barang jasa adm, perkantor serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan	BPPMD	100%			BPPMD	100%			

					Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah	BPPMD	100%			BPPMD	100%			
					Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	BPPMD	100%			BPPMD	100%			
					Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi	BPPMD	100%			BPPMD	100%			
1	20	10	1	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa administrasi perkantoran	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.300.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.300.000.000	APBD	
					Tersediannya pakaian seragam aparatur, satpam, pramubakti, seragam pengemudi dan seragam olah raga pegawai	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					terlaksananya senam kesegaran jasmani bagi aparatur BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					pembinaan Rohani aparatur BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Pelaksanaan Bintek administrasi perkantoran bagi aparatur BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	20	10	2	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Kantor BPPMD	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Banten	1 Kegiatan	700.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	700.000.000	APBD	
1	20	10	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan prasarana Aparatur pada BPPMD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BPPMD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	350.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	350.000.000	APBD	
1				URUSAN WAJIB										
1	11			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;										
1	11	1		Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
					Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)		1 Kab/Kota				1 Kab/Kota			
					Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)		100%				100%			
					Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya		20%				20%			
					Rasio Pembinaan TKP3									
					Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)		100%				100%			
					Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya)		100%				100%			
					Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)		100%				100%			

					Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)		95%				95%			
1	11	1	1	Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak	Rakor Perlindungan Anak	Provinsi Banten	1 Kegiatan	700.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	700.000.000	APBD	
					Fasilitasi Kota Layak Anak	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi Forum Anak Banten									
					Rakor Pokjanal Posyandu									
					Penguatan Forum Kader Posyandu									
1	11	1	2	Penguatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha	Rapat Dewan Penyantun	Provinsi Banten	1 Kegiatan	800.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	800.000.000	APBD	
					Fasilitasi HKG-PKK Tk. Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi HKG-PKK Tk. Nasional	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	11	1	3	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan Kapasitas Penanganan KDRT	Provinsi Banten	1 Kegiatan	600.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	600.000.000	APBD	
					Peningkatan Kapasitas penanganan Traficking	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU)	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Peningkatan kapasitas penanganan HIV/AIDS	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi perlindungan Perempuan	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	11	1	4	Penguatan Organisasi Perempuan	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	Provinsi Banten		600.000.000	APBD	Provinsi Banten		600.000.000	APBD	
					Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi Pengurus Oranganisasi Perempuan	Provinsi Banten				Provinsi Banten				
					Fasilitasi Peringatan Hari Ibu	Provinsi Banten				Provinsi Banten				
1	11	1	5	Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	Rakor Penguatan Jaringan	Provinsi Banten	90 0rang	350.000.000	APBD	Provinsi Banten	90 0rang	350.000.000	APBD	
					Rapat Koordinasi teknis TKP3	Provinsi Banten	40 0rang			Provinsi Banten	40 0rang			
					Advokasi Teknis PPRG	Provinsi Banten	100 orang			Provinsi Banten	100 orang			
					Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PUG dan Anak	Provinsi Banten	70 Orang			Provinsi Banten	70 Orang			
					Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya	Provinsi Banten	7 Dokumen			Provinsi Banten	7 Dokumen			
1	11	1	6	Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Sosialisasi Juknis Pembinaan P2WKSS	Provinsi Banten	40 Orang	350.000.000	APBD	Provinsi Banten	40 Orang	350.000.000	APBD	
					Pembinaan P2WKSS	Provinsi Banten	58 Orang			Provinsi Banten	58 Orang			

					Temu Karya ke Lokasi P2WKSS terbaik di Sumbar									
					Penilaian Lokasi P2WKSS									
					Raker Tim Pokja P2WKSS									
					Pengiriman Utusan P2WKSS Terbsik tahun 2013 ke Jakarta									
1	11	1	7	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan	Rapat Koordinasi POKJATAP GSI	Provinsi Banten	35 Orang	350.000.000	APBD	Provinsi Banten	35 Orang	350.000.000	APBD	
					Pemantapan peningkatan kesehatan bagi pekerja perempuan di perusahaan	Provinsi Banten	35 Orang			Provinsi Banten	35 Orang			
					Fasilitasi Pengembangan Jaringan	Provinsi Banten	35 Orang			Provinsi Banten	35 Orang			
					Workshop Gerakan Sayang Ibu di Rumah Sakit Pemerintah dan	Provinsi Banten	30 Orang			Provinsi Banten	30 Orang			
1	12			Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;										
1	12	1		Kependudukan dan Keluarga Berencana										
					Rasio Peningkatan integrasi pengelolaan layanan keluarga berencana		80 Orang				80 Orang			
1	12	1	1	Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana	Pembinaan PPKBD	8 Kab/Kota	35 Orang	350.000.000	APBD	8 Kab/Kota	35 Orang	350.000.000	APBD	
					Fasilitasi Forum PPKBD	Kota Serang	40 Orang			Kota Serang	80 Orang			
1	13			Sosial;										
1	13	1		Pemberdayaan Masyarakat Miskin										
					Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)		35%				35%			
1	13	1	1	Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Pelatihan Pengelola PNPM MPd	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.500.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	2.000.000.000	APBD	
					Lomba Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Rakor PNPM Mandiri	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Peningkatan Kapasitas UPK	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi Replika PNPM Mandiri	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;										
1	22	1		Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan										
					Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat		60%				60%			
					Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel		11%				11%			

					Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna		3 Posyantek				3 Posyantek			
					Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes)		79%				79%			
					Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa)		3.8 %				3.8 %			
					Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM)		5%				5%			
					Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)		6 desa/kel				6 desa/kel			
					Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa		1261 desa				1261 desa			
1	22	1	1	Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Pembinaan lembaga Adat	8 Kab/Kota	200 Orang	500.000.000	APBD	8 Kab/Kota	200 Orang	500.000.000	APBD	
					Pelatihan KPM	Kabupaten Serang	120 Orang			Kabupaten Serang	120 Orang			
					Pelatihan LPM		250 Orang				250 Orang			
1	22	1	2	Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna XV Tingkat Nasional	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.300.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.300.000.000	APBD	
					Gelar Teknologi Tepat Guna IX Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 90 dan 91	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Penyelenggaraan Peringatan BBGRM Tk. Provinsi	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan AMPL	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	22	1	4	Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan	Pelatihan Pengelola BUMDes	Provinsi Banten	1 Kegiatan	400.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	400.000.000	APBD	
					Pelatihan pengurus Pasar Desa	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Pelatihan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Pelatihan Badan Kswadayaan Masyarakat (BKM)	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Lomba BKM	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Pelatihan Kewirausahaan pelaku ekonomi Kota	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			

1	22	1	5	Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam perkembangan desa/kelurahan	Pembinaan Pemerintahan Desa	Provinsi Banten	1 Kegiatan	700.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	700.000.000	APBD	
					Pembinaan Pengurus BPD	Kabupaten Serang	1 Kegiatan			Kabupaten Serang	1 Kegiatan			
					Perlombaan desa dan kelurahan	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Pemilihan Desa dan kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Tahun	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
					Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	22	1	6	Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Bantuan Pembangunan Desa	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada desa	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.400.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Kegiatan	1.400.000.000	APBD	
					Monitoring dan Evaluasi Bantuan Desa	Provinsi Banten	1 Kegiatan			Provinsi Banten	1 Kegiatan			
1	23			Statistik										
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Data dan informasi pembangunan									
1	23	1	1	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Updating Profile data dasar BPPMD	Provinsi Banten	1 Dokumen	100.000.000	APBD	Provinsi Banten	1 Dokumen	100.000.000	APBD	
					Pembuatan Profil BPPMD Provinsi Banten									
JUMLAH								13.000.000.000				13.500.000.000		

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				URUSAN WAJIB										
1	20			Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	20	9		Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah										
					1. Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan		100%				100%			
1	20	9	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset SKPD		Prov. Banten		87.000.000	APBD	-		87.000.000	APBD	
					1. Penyusunan Laporan Keuangan BPAD TA. 2013		12 Dokumen				12 Dokumen			
					2. Penyusunan Laporan Akuntansi BPAD TA. 2013		12 Dokumen				12 Dokumen			
					3. Penyusunan Laporan Aset BPAD TA. 2013		2 Dokumen				2 Dokumen			
					4. Penyusunan Laporan LHP SKPD Reguler II 2012 dan Reguler I 2013		1 Dokumen				1 Dokumen			
					5. Penyusunan Lapooran Rekonsiliasi Penatausahaan Aset dan Keuangan internal		1 Dokumen				1 Dokumen			
					6. Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan dan Aset BPAD		2 Dokumen				2 Dokumen			
					2. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan		100%				100%			
1	20	9	2	Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPAD		Prov. Banten		350.000.000	APBD	-		350.000.000	APBD	
					1. Fasilitasi Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2014		1 Dokumen				1 Dokumen			
					2. RKA DPA Perubahan TA. 2013		1 Dokumen				1 Dokumen			
					3. Penyusunan Renja TA. 2014		1 Dokumen				1 Dokumen			
					4. Penyusunan LAKIP BPAD TA. 2012		1 Dokumen				1 Dokumen			
					5. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bid. Perpus dan Arda Tahun 2012		1 Dokumen				1 Dokumen			
					6. Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan BPAD Tahun		1 Dokumen				1 Dokumen			
					7. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah TA. 2013		1 Dokumen				1 Dokumen			
					8. Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah (Kab/Kota) TA. 2013		1 Kegiatan				1 Dokumen			

					9. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Program dan Pelaporan BPAD		12 Bulan				12 bulan			
					10. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu		10 Dokumen							
					11. Penyusunan rancangan SOP Perpustakaan dan Kearsipan		1 Dokumen				1 Dokumen			
					12. Fasilitasi Pameran Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka HUT Banten		1 Kegiatan				1 Kegiatan			
1	20	10		Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur										
					Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan		100%				100%			
1	20	10	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Provinsi Banten		524.640.300	APBD	-		1.024.640.300	APBD	
					1. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas		1 Paket				2 Unit Kendaraan Roda 4			
					2. Belanja Modal Pengadaan Almari		1 Paket				1 Paket			
					3. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		1 Paket				1 Paket			
					4. Belanja Modal Pengadaan Komputer PC		10. Unit PC				10. Unit PC			
					5. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book		4 Unit Laptop				4 Unit Laptop			
					6. Belanja Modal Pengadaan Meubelair		10 Set Meja Study Corel, 10 buah Meja Kerja, 10 Buah Meja Baca, 1 Set Meja Rapat , 25 Unit Kursi Susun, 4 Unit Kursi Tunggu, 3 Seat, 10 Unit Kursi Baca				10 Set Meja Study Corel, 10 buah Meja Kerja, 10 Buah Meja Baca, 1 Set Meja Rapat , 25 Unit Kursi Susun, 4 Unit Kursi Tunggu, 3 Seat, 10 Unit Kursi Baca			
					8. Belanja Modal Pengadaan Awning		2 Paket				2 Paket			
					9. Belanja Modal Pengadaan Skat Partisi Ruang Layanan Lantai 1 dan Lantai 2		2 Paket				2 Paket			
					10. Belanja Modal Pengadaan Skat Ruang Server		1 Paket				1 Paket			
					11. Belanja modal pengadaan alat-alat studio		1 Paket				1 Paket			
					1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					Rasio Pembangunan, Pengadaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		100%				100%			

1	20	10	2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Provinsi Banten		428.800.000	APBD	-		428.800.000	APBD	
					1. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		15 Unit Kendaraan Roda 4 dan 8 Unit Roda 2							
					2. Belanja Pemeliharaan Gedung		2 Gedung, 6 Lantai							
					3. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		1 Paket Peralatan Kantor							
					4. Belanja Pemeliharaan Komputer		50 Unit PC + 30 Unit Laptop							
					5. Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor		500 M2							
					1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur									
					Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha, dan Administrasi Kepegawaian		100%				100%			
1	20	10	3	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa BPAD		Provinsi Banten		1.161.286.600	APBD	-		1.331.248.600	APBD	
					1. Belanja Pegawai		47 Orang Pegawai terdiri dari (Satpam, Driver dan Pramubakti) untuk Kebutuhan Rutin 85 Pegawai BPAD dalam 12 Bulan				47 Orang Pegawai terdiri dari (Satpam, Driver dan Pramubakti) untuk Kebutuhan Rutin 85 Pegawai BPAD dalam 12 Bulan			
					2. Belanja Bahan Pakai Habis		Untuk Kebutuhan Gedung dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Gedung dalam 12 Bulan			
					3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					4. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					5. Belanja Alat Kebersihan dan Alat Pembersih		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					6, Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		Untuk Kebutuhan 15 Roda 4 dan 8 Roda 2 selama 12 Bulan				Untuk Kebutuhan 15 Roda 4 dan 8 Roda 2 selama 12 Bulan			

					7. Belanja Telephone		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					8. Belanja Surat Kabar		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					9. Belanja Faximile dan Internet		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					10. Belanja Publikasi		Untuk Kebutuhan per Kegiatan per Triwulan				Untuk Kebutuhan per Kegiatan per Triwulan			
					11. Belanja Cetak dan Penggandaan		Untuk Kebutuhan 1 Paket dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan 1 Paket dalam 12 Bulan			
					12. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan				Untuk Kebutuhan Rutin dalam 12 Bulan			
					13. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		Untuk 85 Pegawai BPAD				Untuk 85 Pegawai BPAD			
					14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Untuk Kebutuhan Rutin dalam Daerah				Untuk Kebutuhan Rutin dalam Daerah			
					15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Untuk Kebutuhan Rutin Luar Daerah				Untuk Kebutuhan Rutin Luar Daerah			
					1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran									
					Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		100%				100%			
1	20	10	4	Kegiatan Pembinaan Aparatur BPAD		Provinsi Banten		109.962.000	APBD	-		50.000.000	APBD	
					1. Bimbingan teknis Internal Pegawai BPAD		50 Pegawai				50 Pegawai			
1	23			STATISTIK										
1	23	1		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah										
					Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)		41 Paket				41 Paket			
1	23	1	1	Penyediaan Data Dan Informasi Pembangunan		Provinsi Banten		50.000.000	APBD	-		50.000.000	APBD	
					1. Penyusunan Penyediaan Data Pembangunan Daerah Bidang Perpustakaan dan Arsip		1 Paket				1 Paket			
1	24			KEARSIPAN										

1	24	1		Program Pembinaan Kearsipan Daerah										
					Persentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan Ketentuan (%)		22 (51 %)				22 (51 %)			
1	24	1	1	Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah		Provinsi Banten		198.000.000	APBD	-		198.000.000	APBD	
					1. Pembenahan Arsip Tidak Beraturan di Depo Arsip Banten Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					2..Pemeliharaan Depo Arsip Provinsi Banten Semester I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					3. Pemeliharaan Depo Arsip Provinsi Banten Semester II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					4. Perawatan Depo Arsip Provinsi Banten Semester I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					5. Perawatan Depo Arsip Provinsi Banten Semester II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					6. Pemusnahan Arsip di Depo Arsip Provinsi Banten Semester I		1 Dokumen selama 12 Bulan				1 Dokumen selama 12 Bulan			
					7. Pemusnahan Arsip di Depo Arsip Provinsi Banten Semester II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					8. Penataan Arsip SKPD Prov. Banten Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					9. Penataan Arsip SKPD Prov. Banten Triwulan II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					10. Penataan Arsip SKPD Prov. Banten Triwulan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					11. Penataan Arsip SKPD Prov. Banten Triwulan IV		1 Dokumen				1 Dokumen			
					12. Evaluasi Pengelolaan Laporan Bulanan Pengelola Arsip SKPD		1 Dokumen							
					13. Rapat Evaluasi Pengelolaan Arsip SKPD Prov. Banten Semester I		30 Pengelola Arsip				30 Pengelola Arsip			
					14. Rapat Evaluasi Pengelolaan Arsip SKPD Prov. Banten Semester II		30 Pengelola Arsip				30 Pengelola Arsip			
					Persentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan Ketentuan (%)		22 (51 %)				22 (51 %)			
1	24	1	2	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten		Provinsi Banten		309.712.300	APBD	-		309.712.300	APBD	
					1. Pembinaan dan Pengembangan SDM bagi calon Fungsional Kearsipan (80 Orang Lembaga Kearsipan Kab/Kota)		40 Orang (1 x Bintek)				80 Orang			
					2.Pembinaan Profesi dan Sumber Daya Aparatur Bidang Kerasipan		70 Orang				80 Orang			
					3. Orientasi Bidang Pembinaan Kearsipan Provinsi dengan Lembaga Kearsipan Nasional dan Kearsipan Kab/Kota		1 Dokumen				1 Dokumen			

					Persentase SKPD Provinsi yang Pengelolaan Arsipnya sesuai dengan Ketentuan (%)		22 (51 %)				22 (51 %)			
1	24	1	3	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah		Provinsi Banten		154.227.300	APBD	-		394.227.300	APBD	
					1. Pterselenggaranya Perubahan Regulasi Kearsipan di Provinsi Banten		11 Draft Perubahan Kepgub. Dan Pergub tentang JRA Kepegawaian Pemprov. Banten				1 fasilitasi perda kearsipan, 1 draft dokumen Pergub			
					2. Terselenggaranya Supervisi Implementasi Penyelenggaraan Kearsipan		43 SKPD + 8 LKD Kab/kota				43 SKPD + 8 LKD Kab/kota			
					3. Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Kearsipan			-						
					Peresentase Cakupan Koneksi Sistem Informasi Kearsipan Provinsi (SIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)		22 (51%)				22 (51%)			
1	24	1	4	Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)		Provinsi Banten		187.000.000	APBD	-		187.000.000	APBD	
					1. Pengolahan Data Arsip Dinamis BPAD Provinsi Banten Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					2. Pengolahan Data Arsip Dinamis BPAD Provinsi Banten Triwulan II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					3. Pengolahan Data Arsip Dinamis BPAD Provinsi Banten Triwulan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					4. Pengolahan Data Arsip Dinamis BPAD Provinsi Banten Triwulan IV		1 Dokumen				1 Dokumen			
					5. Pengelolaan Data Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					6. Pengelolaan Data Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					7. Pengelolaan Data Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					8. Pengelolaan Data Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan IV		1 Dokumen				1 Dokumen			
					9. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					10. Sarana Penunjang Informasi Kearsipan		1 Dokumen				1 Dokumen			
					11. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					12. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan IV		1 Dokumen				1 Dokumen			
					13. Pendampingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					14. Pendampingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan II		1 Dokumen				1 Dokumen			

					15. Pendampingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					16. Pendampingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Daerah Triwulan IV		1 Dokumen				1 Dokumen			
					17. Penyusunan Daftar Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan I		1 Dokumen				1 Dokumen			
					18. Penyusunan Daftar Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan II		1 Dokumen				1 Dokumen			
					19. Penyusunan Daftar Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan III		1 Dokumen				1 Dokumen			
					20. Penyusunan Daftar Arsip Statis SKPD Provinsi Banten Triwulan IV		1 Dokumen				1 Dokumen			
					21. Sosialisasi Sadar Arsip untuk Maysrakat / Arsip Keliling (Sipling)		4 Kab / 3 Kota				4 Kab / 3 Kota			
1	26	1		Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca										
					Tingkat Kunjungan perpustakaan per hari (%)	Prov. Banten	280 (56%)				320 (64%)			
1	26	1	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama Perpustakaan				380.114.000	APBD			380.114.000	APBD	
					1. Pelayanan prima Perpustakaan dan Penataan Koleksi Perpustakaan	Prov. Banten	12 Bulan				12 Bulan			
					2. Layanan Perpustakaan Keliling	Prov. Banten	16 Kegiatan				16 Kegiatan			
					3. Perawatan Bahan Pustaka	Prov. Banten	Stock Opname, Perbaikan Buku dan Fumigasi.				Stock Opname, Perbaikan Buku dan Fumigasi.			
					4. Hari Kunjungan Perpustakaan	Prov. Banten	Lomba mewarnai, 6x Bedah Buku				Lomba mewarnai, Bedah Buku			
					Tingkat Kunjungan Perpustakaan per Hari (%)	Prov. Banten	240 (48%)				240 (48%)			
1	26	1	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat				190.000.000	APBD	-		190.000.000	APBD	
					1. Lomba Bercerita SD Tingkat Provinsi Banten	Kab/Kota	8 Peserta dari Kab/Kota				24 Peserta dari Kab/Kota			
					2. Seminar dan Lokakarya Permasyarakatan Banten Gemar Membaca	Kab/Kota	50 Peserta (Kab/Kota)				60Peserta (Kab/Kota)			
					Meningkatnya Kunjungan ke Website BPAD	Prov. Banten	60 (48%)				60 (48%)			
1	26	1	3	Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika				154.985.600	APBD	-		154.985.600	APBD	
					1. Layanan Audio Visual	Kota Serang	60 x Pemutaran Fil, 4 x Bedah Film				60 x Pemutaran Fil, 4 x Bedah Film			
					2. Layanan dan Pengelolaan Website BPAD	Kota Serang	12 Bulan Tayang				12 Bulan Tayang			

1	26	2		Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan										
					Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standart (%)	Prov. Banten	9 (21%)				9 (21%)			
1	26	2	1	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan				290.000.000	APBD	-		257.000.000	APBD	
					1. Pengadaan Koleksi bahan pustaka tercetak dan terekam Perpustakaan Daerah		550 Judul/1600 Eksemplar, 1 Paket Koleksi				550 Judul/1600 Eksemplar, 1 Paket Koleksi			
					2. Pengadaan Koleksi Mobul Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)		400 Judul/1200 Eksemplar				400 Judul/1200 Eksemplar			
					3. Penyusunan Bibiliografi Induk Daerah (BID)		50 Eksemplar				50 Eksemplar			
					Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standart (%)		9 (21%)				9 (21%)			
1	26	2	2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan		Prov. Banten		172.271.900	APBD	-		172.271.900	APBD	
					1. Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan (SKPD dan Swasta)	Prov. Banten	48 SKPD				48 SKPD			
					2. Sosialisasi Nomor Induk Perpustakaan (NPP)	Prov. Banten	40 Peserta				40 Peserta			
					Peningkatan Jumlah Perpustakaan Sesuai Standart (%)		9 (21%)				9 (21%)			
1	26	2	3	Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten		Provinsi Banten		252.000.000	APBD	-		235.000.000	APBD	
					1. Pemasyarakan UU No.4/1990		500 Eksemplar				500 Eksemplar			
					2. Otomasi Perpustakaan		1 Paket				1 Paket			
					3. Menyusun Katalog Induk Daerah		50 Eksemplar				50 Eksemplar			
					4. Penanganan Koleksi		500 Eksemplar				500 Eksemplar			
JUMLAH								5.000.000.000	APBD	-		5.800.000.000	APBD	

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				URUSAN WAJIB										
1	20			Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan pertanahan				1.640.000.000				2.194.000.000		
1	20	9		Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	Provinsi Banten	100 % tahun 2013	455.000.000		Provinsi Banten	100 % tahun 2013	455.000.000		
					Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan	Provinsi Banten	100 % tahun 2013			Provinsi Banten	100 % tahun 2013			
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan aset BKPP Banten (dok)			125.000.000				125.000.000		
					Tersusunnya dokumen LRA dan evaluasi realisasi keuangan	Serang	1 dok			Serang	1 dok			
					Tersusunnya Laporan Pengelolaan Aset Semester I dan II dan Peningkatan Manajemen Keuangan									
					Tersusunnya dokumen neraca SKPD	Serang	1 dok			Serang	1 dok			
					Tersusunnya dokumen CALK SKPD	Serang	1 dok			Serang	1 dok			
					Tersusunnya laporan fungsional bendahara SKPD	Serang	4 dok			Serang	4 dok			
					Tersusunnya buku/himpunan SPP, SPM dan SP2D	Serang	3 dok			Serang	3 dok			
					Tersajinya data LHP untuk institusi pemeriksa semester I dan II	Serang	2 dok			Serang	2 dok			
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, hasil evaluasi dan pengendalian, serta dokumen pelaporan	Provinsi Banten		330.000.000		Provinsi Banten		330.000.000		
					Terlaksananya pemantapan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan BKPP Provinsi Banten	Serang	1 kali (20 orang; 1 dok)			Serang	1 kali (20 orang; 1 dok)			
					Sosialisasi dan koordinasi program dan kegiatan tahun 2013	Serang, Tangerang, Pandeglang	2 kali (20 orang; 1 dok)			Serang, Tangerang, Pandeglang	2 kali (20 orang; 1 dok)			
					Penyusunan dan Sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) BKPP Provinsi Banten	Serang	3 dok, 30 buku (dok Renja 2013, dok RKA/DPA Perubahan tahun 2013, dan RKA/DPA tahun 2014)			Serang	3 dok, 30 buku (dok Renja 2013, dok RKA/DPA Perubahan tahun 2013, dan RKA/DPA tahun 2014)			
					Penyelenggaraan Rakortas dengan Kab/Kota dan stakeholders	Serang	1 kali (50 org; 1 dok)			Serang	1 kali (50 org; 1 dok)			
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BKPP th 2013	Serang	12 kali (5 dokumen)			Serang	12 kali (5 dokumen)			
					Sosialisasi Renstra 2012-2017 BKPP Provinsi Banten	Serang	1 kali (50 orang)			Serang	1 kali (50 orang)			

					Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan BKPP Th 2013	Serang	4 dok			Serang	4 dok			
					Penyusunan LAKIP, LPPD dan Bahan LKPj Gubernur Banten th 2013	Serang	3 dok (LAKIP, LPPD, dan Bahan LKPj Gub)			Serang	3 dok (LAKIP, LPPD, dan Bahan LKPj Gub)			
1	20	10		Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan (%)	Provinsi Banten	100 % tahun 2013	1.185.000.000		Provinsi Banten	100 % tahun 2013	1.739.000.000		
					Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah (%)	Provinsi Banten	100 % tahun 2013			Provinsi Banten	100 % tahun 2013			
					Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur (%)	Provinsi Banten	100 % tahun 2013			Provinsi Banten	100 % tahun 2013			
					Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)	Provinsi Banten	100 % tahun 2013			Provinsi Banten	100 % tahun 2013			
1	20	10	1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Berjalannya operasional administrasi perkantoran, terkelolanya sistem kearsipan dan dukungan pada kegiatan tingkat provinsi (12 bulan)		100 % tahun 2013	350.000.000			100 % tahun 2013	350.000.000		
					Tersedianya operasional administrasi perkantoran	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			
					Pengelolaan sistem kerasipan internal	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			
					Dukungan kelembagaan pada kegiatan-kegiatan tingkat Provinsi	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			
1	20	10	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar		100 % tahun 2013	225.000.000			100 % tahun 2013	275.000.000		
					Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke Luar dan dalam daerah	Provinsi dan luar provinsi	12 bulan			Provinsi dan luar provinsi	12 bulan			
					Fasilitasi berjalannya rapat-rapat internal	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			
1	20	10	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran (12 bulan)		100 % tahun 2013	306.450.000			100 % tahun 2013	406.450.000		
					Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			
1	20	10	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersediannya sarana dan prasarana perkantoran (12 bulan)		100 % tahun 2013	203.550.000			100 % tahun 2013	607.550.000		
					Tersediaanya sarana dan prasarana kantor	Serang	3 Paket			Serang	3 Paket			
1	20	10	5	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM aparatur BKPP Provinsi Banten		100 % tahun 2013	100.000.000			100 % tahun 2013	100.000.000		
					Membangun Karakter dan Budaya Kerja (Try Out / Bimbingan Teknis)	Tentatif	1 kali (68 orang)			Tentatif	1 kali (68 orang)			
1	23			Statistik				150.000.000				125.000.000		
1	23	1		Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Tersedianya data pembangunan daerah	Provinsi Banten		150.000.000		Provinsi Banten		125.000.000		
1	23	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Berjalannya dan berfungsinya : (1) PPID Pembantu; dan (2) Web site PPID Provinsi Banten	Serang	1 tahun (2013)	150.000.000		Serang	1 tahun (2013)	125.000.000		
					Fasilitasi PPID Pembantu BKPD Provinsi Banten	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			

					Pengeloaan Web Site BKPD Provinsi Banten	Serang	12 bulan			Serang	12 bulan			
					Pengumpulan dan kompilasi data ketahanan pangan dan penyuluhan		1 Dokumen				1 Dokumen			
1	21			Ketahanan Pangan		Provinsi Banten		2.760.000.000		Provinsi Banten		2.731.000.000		
1	21	1		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Provinsi Banten		2.760.000.000		Provinsi Banten		2.731.000.000		
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton setara		200 ton				200 ton			
					Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton setara GKG)		95 ton				95 ton			
					Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (1 lembaga tahun 2017)		0				0			
					Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)		10 lembaga				10 lembaga			
					Jumlah LDPM		5 ldpm				5 ldpm			
					Jumlah Lumbung Pangan		5 lumbung				5 lumbung			
					Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)		100%				100%			
					Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)		100%				100%			
					Dokumen hasil analisis ketersediaan dan cadangan pangan		1 dok				1 dok			
					Informasi pasokan, harga dan akses pangan (3 dok/data)		3 dok				3 dok			
					Dokumen hasil analisis Pasokan, harga dan akses pangan (5		1 dok				1 dok			
					Jumlah lembaga yang menerapkan teknologi pangan (352 lembaga tahun 2017)		202 lembaga				202 lembaga			
					Dokumen hasil analisis kelembagaan teknologi pangan (5		1 dok				1 dok			
					Tersedianya Biaya Operasional Penyaluran (BOP) Raskin		1 tahun				1 tahun			
					Terkendalinya Program Bantuan Raskin									
					Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)		skor 87				skor 87			
					Jumlah lembaga dan pelaku usaha yang dibina dan diawasi dalam penanganan mutu, gizi dan keamanan pangan (140 lembaga		80 lembaga				80 lembaga			
					Sertifikasi dan registrasi hasil pertanian pangan segar (buah dan sayuran)		2 komoditas				2 komoditas			
					Dokumen hasil analisis penganekaragamaan dan keamanan pangan (5 dokumen)		1 dok				1 dok			
					Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)		60%				60%			
					Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)		10 kec				10 kec			
					Dokumen hasil analisis daerah rawan pangan (5 dokkumen)		1 dok				1 dok			

					Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)		40% tahun 2013				40% tahun 2013			
					Jumlah rumusan bahan kebijakan ketahanan pangan (20 dokumen)		4 dok				4 dok			
					Jumlah penghargaan ketahanan pangan (5 Kategori)		5 kategori				5 kategori			
1	21	1	1	Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Terkelola dan tertanganinya kerawanan pangan	Provinsi Banten		320.000.000		Provinsi Banten		370.000.000		
					Gerakan Lingkungan Bebas Rawan Pangan	Provinsi Banten	20 Desa (di 10 kec)			Provinsi Banten	20 Desa (di 10 kec)			
					Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Provinsi Banten	Rakor (3 kali); Fasilitasi Tim SKPG (17 orang)			Provinsi Banten	Rakor (3 kali); Fasilitasi Tim SKPG (17 orang)			
					Analisis dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan di Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Pembinaan Daerah Rawan Pangan pada Masyarakat Pesisir Pantai	Provinsi Banten	2 lokasi			Provinsi Banten	5 lokasi			
					Sosialisasi Reflikasi Desa Mandiri Pangan	Provinsi Banten	2 lokasi			Provinsi Banten	2 lokasi			
					Monitoring kerawanan dan kewaspadan pangan dan gizi	Provinsi Banten	12 bulan			Provinsi Banten	12 bulan			
1	21	1	2	Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan	Terkelola dan berkembangnya ketersediaan dan akses pangan	Provinsi Banten		240.000.000		Provinsi Banten		230.000.000		
					Pemantauan ketersediaan dan akses pangan masyarakat	8 Kab/Kota	8 Kab/Kota			8 Kab/Kota	8 Kab/Kota			
					Analisis dan pemetaan potensi pangan lokal dan analisis situasi akses pangan masyarakat (rumah tangga)	Provinsi Banten	8 Kab/Kota			Provinsi Banten	8 Kab/Kota			
					Apresiasi analisis ketersediaan pangan	Provinsi Banten	8 Kab/Kota			Provinsi Banten	8 Kab/Kota			
					Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan akses pangan	Prov. Banten	10 Dokumen			Prov. Banten	10 Dokumen			
1	21	1	3	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	Terkelola dan berkembangnya cadangan pangan	Provinsi Banten		500.000.000		Provinsi Banten		485.000.000		
					Fasilitasi Pengadaan Pembinaan, Pengelolaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Prov. Banten	15 Kelompok Lumbung			Prov. Banten	15 Kelompok Lumbung			
					Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan/Lumbung Pangan Hidup di Tk. Rumah Tangga	Prov. Banten	18 Kelompok			Prov. Banten	18 Kelompok			
					Fasilitasi agenda Provinsi dan Kab/Kota	Prov. Banten	1 Event			Prov. Banten	1 Event			
					Monitoring dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan	Prov. Banten	1 Dokumen			Prov. Banten	1 Dokumen			
1	21	1	4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan	Terkelola dan berkembangnya sistem distribusi dan harga pangan	Provinsi Banten		300.000.000		Provinsi Banten		271.000.000		
					Apresiasi penguatan kemitraan strategis dalam pengelolaan sistem distribusi dan harga serta menjaga stabilitas pangan	Provinsi Banten	1 kali			Provinsi Banten	1 kali			

					Penyusunan data dan informasi bahan rumusan kebijakan sistim distribusi dan harga pangan	Provinsi Banten	1 dokumen			Provinsi Banten	1 dokumen			
					Rakor Monitoring dan harga pangan	Provinsi Banten	2 kali			Provinsi Banten	2 kali			
					Terfasilitasinya Monitoring dan Evaluasi Sistem DHAP	Provinsi Banten	12 Bulan							
					Fasilitasi sistem informasi distribusi, pasokan dan harga	Provinsi Banten	1 keg			Provinsi Banten	1 keg			
					Informasi prognosa kebutuhan pangan	Provinsi Banten	1 keg			Provinsi Banten	1 keg			
					Rakor Monev Harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional	Provinsi Banten	2 keg			Provinsi Banten	2 keg			
					Fasilitasi kelembagaan distribusi pangan masyarakat	Provinsi Banten	2 keg			Provinsi Banten	2 keg			
1	21	1	5	Pengendalian Program Bantuan Raskin	Terkendalinya program bantuan Raskin	Provinsi Banten		200.000.000		Provinsi Banten		200.000.000		
					Terfasilitasinya sekretariat dan Tim Koordinasi Raskin	Provinsi Banten	1 Tim Kerja			Provinsi Banten	1 Tim Kerja			
					Terselenggaranya Sosialisasi program bantunan raskin tahun	Provinsi Banten	4 Kab/Kota (1 Dok)			Provinsi Banten	4 Kab/Kota (1 Dok)			
					Terselenggaranya Rakor dan evaluasi program Raskin 2013	Provinsi Banten	4 Kali			Provinsi Banten	4 Kali			
					Terfasilitasinya Monev dan Pengendalian Program Raskin	Provinsi Banten	4 Kab/Kota (1 Dok)			Provinsi Banten	4 Kab/Kota (1 Dok)			
1	21	1	6	Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan	Terbina, terkelola dan berkembangnya keamanan pangan	Provinsi Banten		350.000.000		Provinsi Banten		350.000.000		
					Sosialisasi dan Pembinaan keamanan pangan pada pendidikan formal dan non formal	Provinsi Banten	2 Dokumen			Provinsi Banten	2 Dokumen			
					Pengawasan keamanan pangan dan pengujian sampel pangan	Provinsi Banten	2 Dokumen			Provinsi Banten	2 Dokumen			
					Promosi keamanan pangan dan fasilitasi olahan pangan lokal		6.600 Lembar				6.600 Lembar			
					Pembinaan SDM dalam meningkatkan mutu, gizi dan keamanan pangan	Provinsi Banten	400 Orang			Provinsi Banten	400 Orang			
					Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Provinsi Banten	50 Orang			Provinsi Banten	50 Orang			
1	21	1	7	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Terbina dan berkembangnya konsumsi dan keanekaragaman pangan	Provinsi Banten		400.000.000		Provinsi Banten		400.000.000		
					Promosi dan publikasi P2KP	Prov. Banten	4 Dokumen			Prov. Banten	4 Dokumen			
					Percepatan gerakan diversifikasi pangan		16 Dokumen				16 Dokumen			
					Analisis Konsumsi Pangan Penduduk di Provinsi Banten tahun 2013	Provinsi Banten	1 Dokumen			Provinsi Banten	1 Dokumen			
					Monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsultasi	Provinsi Banten	8 Dokumen			Provinsi Banten	8 Dokumen			
1	21	1	8	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	Terfasilitasinya Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten		450.000.000		Provinsi Banten		425.000.000		

					Terfasilitasinya Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	Serang	1 dok (Laporan); 2000 buku pangan lokal; 6 kali publikasi media cetak; 2 kali publikasi media elektronik.			Serang	1 dok (Laporan); 2000 buku pangan lokal; 6 kali publikasi media cetak; 2 kali publikasi media elektronik.			
					Fasilitasi Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	Serang	1 kali (1 dokumen)			Serang	1 kali (1 dokumen)			
					Focus Group Discusion tentang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Serang	1 kali, 20 orang (Pertemuan POKJA); 1 kali (Peningkatan Layanan Penyuluh)			Serang	1 kali, 20 orang (Pertemuan POKJA); 1 kali (Peningkatan Layanan Penyuluh)			
					Pencitraan Dewan Ketahanan Pangan Banten	Serang	1 kali (Penghargaan KP)			Serang	1 kali (Penghargaan KP)			
					Fasilitasi Pameran Lokal dan Nasional	Serang	Fasilitasi pameran dalam rangka Banten Expo (HUT Banten yg ke 13); dan Pameran dalam rangka HPS ke 33			Serang	Fasilitasi pameran dalam rangka Banten Expo (HUT Banten yg ke 13); dan Pameran dalam rangka HPS ke 33			
2				URUSAN PILIHAN										
2	1			PERTANIAN										
2	1	3		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan				6.450.000.000				6.450.000.000		
					Cakupan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian (unit)	Provinsi Banten	5 unit tahun 2013			Provinsi Banten	5 unit tahun 2013			
					Cakupan peningkatan akses kelompok tani terhadap perbankan (unit)	Provinsi Banten	2 unit tahun 2013			Provinsi Banten	2 unit tahun 2013			
					Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)	Provinsi Banten	2 unit tahun 2013			Provinsi Banten	2 unit tahun 2013			
					Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)	Provinsi Banten	20 unit tahun 2013			Provinsi Banten	20 unit tahun 2013			

2	1	3	1	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Terbina dan berkembangnya kapasitas kelembagaan penyuluhan	Provinsi Banten		750.000.000		Provinsi Banten		750.000.000		
					Peringatan hari krida pertanian	Provinsi Banten	1 kali (800 org aparatur dan masyarakat petani)			Provinsi Banten	1 kali (800 org aparatur dan masyarakat petani)			
					Fasilitasi Pertemuan Daerah (PEDA) Tahun 2013	Provinsi Banten	500 Orang			Provinsi Banten	500 Orang			
					Fasilitasi pertemuan kelembagaan tingkat nasional	Provinsi Banten	3 Kali			Provinsi Banten	3 Kali			
					Fasilitasi pertemuan Rembug Madya KTNA Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 Kali (30 Orang)			Provinsi Banten	1 Kali (30 Orang)			
					Koordinasi, konsultasi, dan pengendalian dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan		2 Kali Rakor (25 Orang)				2 Kali Rakor (25 Orang)			
					Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan	Provinsi Banten	8 Kab/Kota			Provinsi Banten	8 Kab/Kota			
					Up Dating Data dan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dalam Provinsi & Luar Provinsi	1 Dokumen			Dalam Provinsi & Luar Provinsi	1 Dokumen			
2	1	3	2	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Terbina dan berkembangnya kapasitas sumberdaya penyuluh dan tersusunnya programa penyuluhan	Provinsi Banten		5.700.000.000		Provinsi Banten		5.700.000.000		
					Koordinasi, konsultasi, dan pengendalian dalam rangka penguatan kapasitas SDM penyuluh dan program penyuluhan	Provinsi Banten	2 Kali Rakor (25 Orang)			Provinsi Banten	2 Kali Rakor (25 Orang)			
					Penyusunan programa penyuluhan dan dokumen pendukung lainnya tk. Provinsi	Provinsi Banten	1 Dokumen (10 Buku)			Provinsi Banten	1 Dokumen (10 Buku)			
					Fasilitasi Bantuan Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan	Provinsi Banten	12 Bulan (857 Penyuluh)			Provinsi Banten	12 Bulan (857 Penyuluh)			
					Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh	Provinsi Banten	322 Orang Penyuluh PNS			Provinsi Banten	322 Orang Penyuluh PNS			
					Penguatan SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PNS, THL-TBPP, PPTK/Honorer/Penyuluh Revitalisasi)	Provinsi Banten	857 Penyuluh			Provinsi Banten	857 Penyuluh			
					Penilaian Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PNS, THL-TBPP/PPTK, dan Swadaya)	Provinsi Banten	6 Kategori			Provinsi Banten	6 Kategori			
JUMLAH								11.000.000.000				11.500.000.000		

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				537.500.000				537.500.000		
					Rasio Ketersedian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.		100 %							
					Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan		100 %							
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				162.500.000				162.500.000		
					Forum SKPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Banten (Keg)		2 Keg.							
					Penyusunan Renja BPBD Provinsi Banten (Keg.)		1 Keg.							
					Penyusunan Perubahan DPA SKPD (1 Keg.)		1 Keg.							
					Penyusunan Laporan Bulanan dan Evaluasi Internal Bulanan		17 Lap.							
					Penyusunan RKA DPA (Keg)		1 Keg.							
					Penyusunan LAKIP BPBD (Keg.)		1 Keg.							
					Penyusunan LKPJ BPBD (Keg.)		1 Keg.							
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				375.000.000				375.000.000		
					Penyusunan Neraca Keuangan BPBD (Keg.)		1 Keg.							
					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Tahunan		17 Lap.							
					Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD Kab/Kota se-Provinsi Banten (Keg,)		1 Keg.							
					Pemuktahiran Sistem Aplikasi Penata usahaan Keuangan Daerah		1 Keg.							
					Penyusunan Laporan CALK (Keg.)		1 Keg.							
					Penyusunan Laporan Aset (Keg.)		1 Keg.							
					Penyusunan LRA (Keg.)		1 Keg.							
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				3.115.516.000				3.115.516.000		
					Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumah Tanggaan		100 %							
					Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur		100 %							
1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				795.150.000				856.250.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		1 Keg.							
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				557.155.000				468.755.000		
					Pemeliharaan Gedung Kantor (Th.)		1 Pakt.							

					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Th.)		100 Unit							
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				1.763.211.000				1.790.511.000		
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (Th.)		1 Th.							
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di luar daerah									
1	20	3		Penanggulangan Bencana				5.346.984.000				5.596.984.000		
					Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana		100 %							
1	20	3	1	Pencegahan dan penyebarluasan informasi				1.825.500.000				1.825.500.000		
					Pemberitaan Early Warning Bencana Alam		1 Keg.							
					Pembuatan Penyampai Informasi Bencana Alam		1 Keg.							
					Pembuatan Panduan Penanggulangan Bencana		1 Keg.							
					Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan PRB dan MAPI di daerah		1 Keg.							
					Fasilitasi Pembentukan Organisasi atau satuan gugus tugas bencana		1 Keg.							
					Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Organisasi Kebencanaan		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kota Serang		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kab. Serang		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kota Cilegon		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kota Tangerang		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kota Tangsekl		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kab. Tangerang		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kab. Pandeglang		1 Keg.							
					Sosialisasi Program Early Warning melalui Bilboard di Kab. Lebak		1 Keg.							
					Internalisasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal Tk. SD di Kab. Tangerang		1 Keg.							
					Internalisasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal Tk. SLTP di Kab. Lebak		1 Keg.							
					Internalisasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal Tk. SLTA di Kab. Pandeglang		1 Keg.							
					Internalisasi Penanggulangan Bencana Dalam Muatan Lokal Tk. SMK di Kab. Serang		1 Keg.							

1	20	3	2	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana				867.000.000				867.000.000		
					Penyusunan Rencana Kontinjensi (Dok)		1 Keg.							
					Table Top Exercise (TTX)-(Keg.)		1 Keg.							
					Gladi dan Simulasi PRB (1500 org)		1500 Org.							
					Pelatihan TRC dan SRC (1 Keg x 40 org)		1 Keg.							
					Pameran Pengurangan Resiko Bencana (1 Keg./Dok.)		1 Dok.							
					Penyusunan Pedoman Prosedur Tetap Kebencanaan (1 Dok)		1 Dok.							
					Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (50 org.x 1 Keg)		50 Org.							
					Fasilitasi Organisasi Relawan (Satuan Gugus Bencana /SGB)		8 SGB							
					Koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di daerah.		40 Org.							
1	20	3	3	Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana				375.000.000				625.000.000		
					Fasilitasi Pemantapan Manajemen Peralatan		1 Keg.							
					Fasilitasi dan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Peralatan Kab./Kota		1 Keg.							
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedaruratan dan Logistik		1 Keg.							
					Penyediaan Peralatan Penannganan Kedaruratan Bencana (Ganset)		1 Unit							
					Penyediaan Peralatan Penannganan Kedaruratan Bencana Alat Angkut Barang Berat (Trolley)		4 Unit							
					Monev ke Daerah Rawan Bencana		1 Keg.							
1	20	3	4	Fasilitsi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan				1.379.484.000				1.379.484.000		
					Penyediaan Peralatan Kedaruratan		10 Pakt.							
					Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban dan Pengungsi		10 Pakt.							
					Penyediaan dukungan logistik kebencanaan		12 Pakt.							
					Rakoor TRC/BPBD		1 Keg.							
					Monev		1 Keg.							
1	20	3	5	Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca				500.000.000				500.000.000		
					Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sosial ekonomi korban bencana (Th);		1 tahun							
					Fasilitasi bantuan rehabilitasi pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi pascabencana (Pakt/Th);		1 paket							
					Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi (Th);		1 tahun							
1	20	3	6	Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca				400.000.000				400.000.000		
					Bantuan rekonstruksi pasca bencana (4 Pakt)		4 Pakt.							

					Koordinasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana di Daerah Pasca Bencana		1 Pakt.							
					Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi daerah terkena bencana (1 Th);		1 tahun							
1	23			Statistik										
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah				150.000.000				150.000.000		
					Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan BPBD		100 %							
1	23	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan				150.000.000				150.000.000		
					Fasilitasi Data Kebencanaan (Th)		1 Dok							
JUMLAH								9.150.000.000				9.400.000.000		

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				5.400.000.000				6.100.000.000		
					Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan		100%							
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				130.000.000				130.000.000		
					Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		3 dok							
					Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Keuangan Balitbangda (Neraca, LRA dan CALK)		3 dok							
					Penyusunan Laporan Inventarisasi SP2D		1 dok							
					Penyusunan Laporan Akhir Tahun		1 dok							
					Pemeliharaan Database dan Pembaharuan Sistem Informasi Kebendaharaan		1 dok							
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				1.270.000.000				1.370.000.000		
					Pelaksanaan Rakorbid Balitbangda Tahun 2013		1 dok							
					Penyusunan Rencana Kerja Balitbangda TA. 2014		1 dok							
					Penyusunan Penetapan Kinerja Balitbangda Tahun 2013		1 dok							
					Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan Balitbangda Tahun 2013		12 dok							
					Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Balitbangda TA. 2012		2 dok							
					Penyusunan DPA Perubahan Balitbangda Tahun 2013		1 dok							
					Penyusunan RKA- DPA Balitbangda Tahun 2014		1 dok							
					Penyusunan LAKIP Balitbangda TA. 2013		1 dok							
					Penyusunan LKPJ Balitbangda TA. 2013		1 dok							
					Penyusunan LPPD / Indeks Kinerja Kunci Balitbangda 2013		1 dok							
					Sosialisasi Kebijakan Strategis Daerah Pengembangan Iptek		1 dok							
					Rapat Kerja Forum Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Barat		1 dok							
					Koordinasi ke Business Innovation Center Indonesia dan Business Technology Center		1 dok							

1	20	9	3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten				4.000.000.000				4.600.000.000		
					Fasilitasi Dewan Riset Daerah Bidang Pemerintahan		1 dok							
					Fasilitasi Dewan Riset Daerah Bidang Ekonomi		1 dok							
					Fasilitasi Dewan Riset Daerah Bidang Sosial Budaya		1 dok							
					Fasilitasi Dewan Riset Daerah Bidang Sumber Daya Alam		1 dok							
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				2.150.000.000				2.150.000.000		
					Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		100%							
1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				450.000.000				450.000.000		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		4 unit Kendaraan, 54 unit Sarana &							
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				200.000.000				200.000.000		
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		4 paket							
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				1.500.000.000				1.500.000.000		
					Penyediaan Tenaga Pegawai Tidak Tetap		16 org							
					Penyediaan Barang dan Jasa Kantor		18 paket							
1	20	14		Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah dan IPTEK				2.400.000.000				2.600.000.000		
					Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah		34 dok							
1	20	14	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan				300.000.000				300.000.000		
					Kajian Grand Design Pemekaran Daerah Otonom di Provinsi Banten		1 dok							
					Kajian Struktur Tata Kelola Sistem Inovasi Daerah		1 dok							
1	20	14	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan				250.000.000				250.000.000		
					Diskusi Pola Sinergitas Triple Helix dalam Implementasi Sistem Inovasi Daerah		1 dok							
					Workshop Strategi dan Implementasi SINas dan SIDa Provinsi dan Kab/Kota		1 dok							
					Kajian Inventarisasi Produk Inovatif yang Layak di Patenkan (HKI) dan Standarisasi (SNI)		1 dok							
1	20	14	3	Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang				300.000.000				300.000.000		

					Pengembangan Keterampilan Lulusan SMK dalam pemanfaatan IPTEK bidang Industri Kreatif		1 dok							
					Pengembangan Keterampilan Lulusan SMK dalam pemanfaatan IPTEK bidang Peternakan		1 dok							
					Pengembangan Keterampilan Lulusan SMK dalam pemanfaatan IPTEK bidang Perkebunan		1 dok							
					Pengembangan Keterampilan Lulusan SMK dalam pemanfaatan IPTEK bidang Pertanian		1 dok							
1	20	14	4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan				300.000.000				300.000.000		
					Survey tipe keterampilan khusus berbasis Iptek SDM lokal di kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		1 dok							
					Kajian tingkat partisipasi masyarakat dan penguatan kohesi sosial dalam penguatan SIDa		1 dok							
1	20	14	5	Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna				400.000.000				475.000.000		
					Kajian Pengembangan Inkubator Teknologi Berbasis Sumber Daya Lokal		1 dok							
					Kajian Pengembangan potensi umbi-umbian lokal di wilayah Provinsi Banten		1 dok							
					Rakor Litbang Fokus Tematik SIDa Prov dan Kab/Kota Tingkat Provinsi		2 dok							
					Launching SIDa Banten Provinsi Banten dan Penandatanganan Mou / PKS Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek lintas pemerintahan		1 seminar, 1 workshop, 4 naskah MoU							
1	20	14	6	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi				350.000.000				425.000.000		
					Kajian Pengembangan Desa Inovatif Model di Provinsi Banten		1 dok							
					Kajian Pengembangan sentra pelatihan produk unggulan daerah		1 dok							
					Mapping dan analisis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Banten melalui metode ANIS		1 dok							
					Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi SIDa Banten		1 dok							
1	20	14	7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan				300.000.000				350.000.000		
					Kajian Klaster Bisnis Inovatif Bidang Agribisnis dan Agroindustri di Provinsi Banten		1 dok							
					Diskusi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Iptek di Kawasan Strategis Nasional (Selat Sunda dan Tangerang)		1 dok							

					Fasilitasi Pengembangan "Desa Inovatif Model" di Kabupaten Pandeglang dan Lebak		2 desa							
1	20	14	8	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang				200.000.000				200.000.000		
					Kajian Inventarisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur di Kabupaten Lebak		1 dok							
					Diskusi Kajian Inventarisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur di Kabupaten Lebak		1 dok							
1	23			Statistik										
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah				550.000.000				550.000.000		
					Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan		1 paket							
1	23	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan				550.000.000				550.000.000		
					Inventarisasi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Iptek		1 dok							
					Seminar (Qolloquium) Hasil Penelitian Balitbangda dan Lembaga Riset lain di Provinsi		1 seminar							
					Penyusunan Buletin dan Jurnal Litbang		3 terbitan (2 buletin & 1							
					Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Informasi IPTEK (Cafe Inovasi)		1 paket							
					Penyediaan Website Gerbang Inovasi Banten		1 buah							
					Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat Provinsi Banten (Piala Gubernur)		3 katagori							
					Pameran Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan		4 paket							
JUMLAH								10.500.000.000				11.400.000.000		

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				Urusan Wajib										
1	5			Penataan Ruang										
1	5	1		Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan				800.000.000				800.000.000		
					Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang		3 dok							
1	5	1	1	Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan				800.000.000				800.000.000		
					Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam		1 dok							
					Penyusunan Usulan Rancangan Renja SKPD Mitra Tata Ruang dan SDA		1 kali							
					Asistensi Rancangan Awal Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan SDA		1 kali							
					Verifikasi Rancangan Akhir Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Tata Ruang dan SDA		1 kali							
					Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Daerah		3 kali							
					Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang		1 dok							
					Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten		1 kali							
					Pendayagunaan Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan		1 dok							
					Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		1 dok							
					Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten		1 kali							
					Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang		1 dok							
1	6	1		Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				10.149.500.000				9.870.498.100		
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan		100%							
1	6	1	1	Perencanaan Pembangunan Daerah				2.250.000.000				2.176.500.000		
					1. Forum Konsultasi Publik		2 dok							
					2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014		5 dok							
					3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014		2 dok							

					4. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014		1 dok							
					5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014		1 dok							
					6. Verifikasi Akhir Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014		1 dok							
					7. Fasilitasi Dan Konsultasi Rancangan RPJMD		3 dok							
					8. Penyusunan Bahan Masukan Musrenbang Kabupaten/Kota		3 dok							
					9. Pemantauan Musrenbang Kecamatan KPP/KSP		3 dok							
					10. Penyusunan Rancangan Nomenklatur Kegiatan Dan Tolok Ukur Kegiatan SKPD Provinsi Banten Tahun 2015									
					11. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan									
1	6	1	2	Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah				999.500.000				942.500.000		
					1. Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2014		2 dok							
					2. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2013		2 dok							
					3. Fasilitasi MUSRENBANGNAS		1 dok							
					4. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan		1 dok							
					5. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013									
1	6	1	3	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata				1.200.000.000				1.151.498.100		
					1. Evaluasi Dan Pengendalian dan Pelaksanaan Renstra SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata		1 dok (3 buku)							
					2. Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata TA 2014		1 dok (3 buku)							
					3. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata		1 dok (8 buku)							
					4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2014		1 dok (8 buku)							
					5. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata		1 dok (3 buku)							
					6. Koordinasi Perencanaan Mitra Indagkop, Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata		1 dok (1 kali)							

					7. Penyusunan Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah		1 dok (9 buku)							
					8. Workshop Kebijakan Dan Evaluasi Ekonomi Makro Daerah		1 dok (8 buku)							
					9. Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)		1 dok (1 paket)							
					10. Workshop MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Banten)		1 dok (8 buku)							
					11. Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor sumatera (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten		1 dok (8 buku)							
					12. Evaluasi Pelaksanaan MP3EI koridor jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten		1 dok (8 buku)							
					13. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung		1 dok (8 buku)							
					14. Penyusunan Rencana Aksi Daerah MP3Ei Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten		1 dok (9 buku)							
					15. Workshop Rencana Aksi Daerah MP3EI Koridor Jawa (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi Banten		1 dok (8 buku)							
					16. Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten		1 dok (9 buku)							
					17. Workshop Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten		1 dok (8 buku)							
					18. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten		1 dok (32 buku)							
					19. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan KEK Tanjung Lesung		1 dok (8 buku)							
					20. Penyusunan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan		1 dok (3 buku)							
1	6	1	4	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan				900.000.000				900.000.000		
					1. Evaluasi dan Pengendalian Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD Mitra		1 dok							
					2. Penyusunan Usulan Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra		1 dok							
					3. Asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Mitra		1 dok							
					4. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Bidang		1 dok							

					5. Penajaman Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra		1 dok							
					6. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja SKPD Mitra		1 dok							
					7. Sinkronisasi Perencanaan Non APBD		1 dok							
					8. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah		1 dok							
					9. Rapat Koordinasi Kawasan Agropolitan		1 dok							
					10. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra		1 dok							
					11. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan		1 dok							
					12. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi		1 dok							
					13. Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan		1 dok							
					14. Perencanaan Kebutuhan Pangan Dalam Rangka Mendukung KEK Pariwisata		1 dok							
1	6	1	5	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah				1.200.000.000				1.200.000.000		
					1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RENSTRA 2012-2017 dan RENJA 2013 SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013		1 dok							
					2. Koordinasi Penyusunan Rancangan RENJA SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014		1 dok							
					3. Asistensi Rancangan RENJA Awal Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014		1 dok							
					4. RAKORBID Mitra Bidang Tata Ruang dan Praswil		1 dok							
					5. Verifikasi Rancangan RENJA Akhir Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2014		1 dok							
					6. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah		1 dok							
					7. Rapat Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014		1 dok							
					8. Rapat Koordinasi Perencanaan KONREG Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014		1 dok							
					9. Perencanaan dan Pengendalian Program AMPL		1 dok							
					10. Workshop Fasilitasi Penyusunan Buku Putih dan SSK		1 dok							
					11. Workshop Fasilitasi Penyusunan Dokumen Momerandum Program sktor		1 dok							
					12. Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2013		1 dok							

					13. Bimbingan Teknis Perkuatan Kelembagaan AMPL/PPSP Pokja Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2013		1 dok							
					14. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Perumahan dan		1 dok							
					15. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air		1 dok							
					16. Sinkronisasi Perencanaan Program Bidang Prasarana		1 dok							
					17. Lokakarya Penanganan Infrastruktur Mendukung Daya		1 dok							
					18. Update Data Buku Saku AMPL		1 dok							
					19. Rakor Kesiapan Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)		1 dok							
					20. Review RENSTRA AMPL Provinsi		1 dok							
					21. Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN Terpadu Baros		1 dok							
					22. Rapat Koordinasi Target Capaian SKPD Bidang Infrastruktur Wilayah									
1	6	1	6	Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban				650.000.000				650.000.000		
					1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012--2017 dan Renja 2012 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban		1 dok							
					2. Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013 SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban		1 dok							
					3. Koordinasi Penyusunan Rencangan Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan		1 dok							
					4. Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban		1 dok							
					5. Rakor Pembangunan Bidang Politik, Hukum, HAM dan		1 dok							
					6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah		1 dok							
					7. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban		1 dok							
					8. Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 dok							
					9. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu 2014		1 dok							
1	6	1	7	Perencanaan dan Pengendalian Tata				700.000.000				600.000.000		
					1. Evaluasi Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2012 SKPD		1 dok							
					2. Pengendalian Pelaksanaan Renstra 2012-2017 dan Renja 2013		1 dok							

					3. Penyusunan Usulan Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Tata		1 dok							
					4. Asistansi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Bidang Tata		1 dok							
					5. Rakorbid Pemerintahan 2013		1 dok							
					6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah		1 dok							
					7. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Bidang Tata		1 dok							
					8. Rakor Perencanaan Penyelenggaraan Tugas Umum		1 dok							
					9. Pra Musrenbang Regional Se Jawa Bali Tahun 2013		1 dok							
1	6	1	8	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan				750.000.000				750.000.000		
					1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2012-2017 dan RENJA Tahun 2012 SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender		2 dok							
					2. Koordinasi Penyusunan Rancangan RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender		1 dok							
					3. Asistensi Rancangan Awal RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014		1 dok							
					4. RAKORBID Mitra Bidang SOSMAS Tahun 2013		1 dok							
					5. Verifikasi Rancangan akhir RENJA SKPD Mitra Subid Kesos dan Gender Tahun 2014		1 dok							
					6. Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah		1 dok							
					7. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA)		2 dok							
					8. Evaluasi dan Perencanaan Penanggulangan HIV/AIDS		1 dok							
					9. Evaluasi dan Perencanaan PUG dan PUHA		2 dok							
					10. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota		1 dok							
1	6	1	9	Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan				700.000.000				700.000.000		
					1. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Renstra Tahun 2012-2017 dan Renja SKPD Mitra Tahun 2012		1 dok							
					2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD Mitra Tahun 2014		1 dok							
					3. Asistensi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Tahun 2014		1 dok							
					4. Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Mitra Tahun 2014		1 dok							
					5. Perencanaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah		1 dok							

					6. Perencanaan Pengembangan SDM, Budaya dan Keagamaan		1 dok							
					7. Perencanaan Pengembangan Daya Saing SDM Banten		1 dok							
					8. Rapat Koordinasi Pendidikan Untuk Semua		1 dok							
1	6	1	10	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah				800.000.000				800.000.000		
					1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012		14 dok							
					2. Pelatihan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan		2 dok							
					3. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)		1 dok							
					4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan		1 dok							
					5. Penyusunan Laporan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan		3 dok							
					6. Pelatihan Analisis Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan		1 dok							
					7. Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014		1 dok							
					8. Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T)		1 dok							
1	6	2		Pengendalian Pembangunan Daerah				1.950.000.000				1.950.000.000		
					Cakupan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan		100%							
1	6	2	1	Pengendalian dan Evaluasi Program APBD				1.195.000.000				1.195.000.000		
					1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2012		1 Dok (40 buku)							
					2. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012		1 Dok (200 buku)							
					3. Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2013		1 Dok (80 buku)							
					4. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013		1 Dok (80 buku)							
					5. Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013		1 Dok (80 buku)							
					6. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013		1 Dok (60 buku)							

					7. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010		1 Dok (80 buku)							
1	6	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya				755.000.000				755.000.000		
					1. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun		8 Dok (160 buku)							
					2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2013		4 Dok (60 buku)							
					3. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2013		2 Dok (40 buku)							
1	6	3		Kerjasama Pembangunan Daerah				1.400.000.000				1.400.000.000		
					Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah		3 dok							
1	6	3	1	Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama				1.400.000.000				1.400.000.000		
					1. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2012		1 dok							
					2. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Daerah		1 dok							
					3. Asistensi Renja Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014		4 dok							
					4. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama		1 dok							
					5. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah Provinsi		1 dok							
					6. Musrenbangtas Banten - Jabar Tahun 2013		1 dok							
					7. Sinkronisasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Tahun		1 dok							
					8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar		1 dok							
					9. Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastuktur		1 dok							
					10. Rapat Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta Tahun 2013		1 dok							
					11. Rakor Musrenbangreg se Jawa Bali		1 dok							
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				1.750.000.000				1.750.000.000		
					Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan		100%							
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				400.000.000				400.000.000		
					1. Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2012		1 dok							

					2. Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013		1 dok							
					3. Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013		1 dok							
					4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013		1 dok							
					5. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten.		1 dok							
					6. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013.		1 dok							
					7. Penyusunan Dokumen LRA,Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I; Prognosis 6 (enam bulan berikutnya) dan Semester II.		1 dok							
					8. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013		1 dok							
					9. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA.2013 Periode TW.I; TW.II;TW.III dan TW.IV		1 dok							
					10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker BAPPEDA Provinsi Banten TA.2013 Semester I dan Semester II		1 dok							
					11. Penyusunan Dokumen Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bappeda Provinsi Banten									
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				1.350.000.000				1.350.000.000		
					1. Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Bappeda		1 dok							
					2. Penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2012		1 dok							

					3. Penyusunan LKPJ Bappeda Tahun 2012		1 dok							
					4. Penyusunan LPPD Bappeda Tahun 2012		1 dok							
					5. Penyusunan TAPKIN dan IKU Tahun 2013		1 dok							
					6. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Bappeda		1 dok							
					7. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014		1 dok							
					8. Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014		1 dok							
					9. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013		1 dok							
					10. Forum Saresehan		1 dok							
					11. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi		1 dok							
					12. Forum Program, Evaluasi dan Pelaporan SKPD se Provinsi Banten		1 dok							
					13. Sistem Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Bappeda		1 dok							
					14. Penyusunan Rancangan Awal Pergub Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SPPPD) Provinsi		1 dok							
					15. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Bappeda		1 dok							
					16. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2013		1 dok							
					17. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Tahun Anggaran 2013		1 dok							
					18. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDA)									
					19. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen pengendalian Daerah (SIMPELDA)									
					20. Pembuatan Aplikasi Perpustakaan Khusus									
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				7.834.300.000				8.113.301.900		
					Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan		100%							

1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				1.900.500.000				2.295.015.900		
					1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		3 unit							
					2. Pengadaan Mesin Vacum Cleaner		2 unit							
					3. Pengadaan Almari Besi		6 unit							
					4. Pengadaan Filling Kabinet		6 unit							
					5. Pengadaan Toilet Jongkok dan Toilet Duduk		1 paket							
					6. Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan		1 paket							
					7. Pengadaan Pintu Kaca		1 paket							
					8. Pengadaan Electrical Pintu Kaca		1 paket							
					9. Pengadaan Pager di Lingkungan Kantor Bappeda		1 paket							
					10. Pengadaan Komputer PC		10 unit							
					11. Pengadaan Notebook		5 unit							
					12. Pengadaan Printer		5 unit							
					13. Pengadaan Meubelair Kantor (Kursi, Meja, Rak Buku/TV)		1 paket							
					14. Pengadaan Interior Ruang Kepala Bappeda		1 paket							
					15. Pengadaan Interior Ruang Loby Bappeda		1 paket							
					16. Pengadaan Taman Air Kantor Bappeda		1 paket							
					17. Pengadaan Audio System Ruang Front Office		1 paket							
					18. Pengadaan AC		11 unit							
					19. Pengadaan Handy Talki		5 unit							
					20. Pengadaan Mesin Air		1 unit							
					21. Pengadaan AC Split 1 PK									
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				1.800.000.000				1.731.046.000		
					1. Pemeliharaan Gedung dan		12 bln							
					2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		12 bln							
					3. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor		52 unit							
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				3.633.800.000				3.587.240.000		
					1. Penunjang Penguatan		5 dok							
					2. Penyediaan Barang Habis Pakai		12 bln							
					3. Penyediaan Bahan Cetak		12 bln							
					4. Penyediaan Makan dan Minum Kantor		12 bln							
					5. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN		12 bln							
					6. Konsultasi dan Koordinasi dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten		12 bln							
					7. Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor		12 bln							
1	20	10	4	Peningkatan Kapasitas Aparatur				500.000.000				500.000.000		

					1. Peningkatan Kemampuan dan Eksistensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten		100 org							
					2. Bimbingan teknis Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Rencana Strategis Internal Bappeda Provinsi Banten		2 kali							
					3. Fasilitasi Kenaikan Gaji Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten									
					4. Fasilitasi kenaikan gaji berkala dan golongan PNS Bappeda Provinsi Banten									
					5. Fasilitasi Perkuatan kelembagaan dan validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten									
					6. Pemutakhiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten									
					7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten		10 kali							
					8. Fasilitasi Pengiriman Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		3 org							
					9. Koordinasi/Konsultasi Kepegawaian		8 kali							
1	23			Statistik										
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah				650.000.000				650.000.000		
					Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan		41 SKPD							
1	23	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan				650.000.000				650.000.000		
					1. Koordinasi dan Konsultasi Data Daerah		1 dok. 7 kalai rapat							
					2. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan		4 dok							
					3. Penyusunan Profile Informasi Pembangunan		1 dok							
					4. Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten		1 dok							
					5. Pelaporan Kinerja Kegiatan		1 dok							
					6. Penyusunan Data Bappeda									
JUMLAH								24.533.800.000				24.533.800.000		

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				Urusan Wajib										
1	16			Penanaman Modal										
1	16	1		Peningkatan Iklim Investasi				2.225.000.000				2.185.000.000		
					Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal		20%							
1	16	1	1	Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				550.000.000				510.000.000		
					Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Dunia Usaha		2 Keg							
					Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Non Dunia Usaha		3 Keg							
					Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal PMA dan PMDN		51 PMA/PMD							
					Fasilitasi Permasalahan Penanaman Modal (Task Force)		8 Permasalahan							
					Koordinasi dan Konsultasi (DKI, BKPM RI dan JABAR)		12 Bulan							
1	16	1	2	Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal				1.215.000.000				1.165.000.000		
					Verivikasi Penerbitan Izin dan Non Izin Pelayanan Penanaman Modal		1 Dok							
					Pemantauan dan Pelaporan fasilitasi PTSP Kab/Kota Se-Provinsi		8 PDKPM							
					Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal		1 Paket							
					Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat		2 Dok							
					Penyusunan Regulasi PTSP bidang Penanaman Modal		1 Dok							
					Koordinasi PTSP Luar Provinsi Banten		12 Bulan							
					Pembuatan dan Pemasangan Billboard di Lima Kawasan Industri		5 Unit							
1	16	1	3	Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal				460.000.000				510.000.000		
					Sosialisasi PTSP Se Provinsi Banten		1 Keg							
					Forum PTSP Lintas Kab/Kota Se Provinsi Banten		1 Keg							
					Fasilitasi Forum PTSP Nasional		1 Keg							
					Fasilitasi Percepatan Realisasi Investasi		1 Keg							
					Bimbingan dan Pelatihan SPIPISE		2 Keg							
					Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		12 Bulan							
1	16	2		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				5.700.000.000				5.700.000.000		

					Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)		8.51Trilyun							
					Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)		3,68 Trilyun							
1	16	2	1	Penyelenggaraan Promosi Investasi				4.700.000.000				4.700.000.000		
					Pengadaan Alat dan Bahan Promosi		4 paket							
					Banten Investmen Forum di Jakarta		1 Keg							
					Partisipasi Infrastruktur Summit di Jakarta		1 Keg							
					Partisipasi Indonesia Trade Expo		1 Keg							
					Penyelenggaraan Promosi Investasi di Banten		1 Keg							
					Penyelenggaraan Bantenj Investment Forum di Singapura		1 Keg							
					Partisipasi Promosi Investasi di Luar Negeri mengikuti Agenda MII BKPM RI		1 Keg							
					Promosi Investasi Melalui Media Elektronik		1 Keg							
					Promosi Investasi Melalui Media Cetak		1 Keg							
					Publikasi Investasi Melalui Media Cetak Penerbangan		1 Keg							
					Publikasi Investasi Melalui Outdoor		1 Keg							
					Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		1 Keg							
1	16	2	2	Kerjasama Investasi				1.000.000.000				1.000.000.000		
					Fasilitasi Penyelenggaraan Penyusunan Potensi Daerah Anggota MPU bdang Penanaman Modal		1 Keg							
					Fasilitasi Kerjasama Investasi Regional dan Internasional		2 Keg							
					Fasilitasi Penyelenggaraan Penyusunan Potensi Daerah Anggota MPU bdang Penanaman Modal		1 Keg							
					Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Sektor Swasta		1 Keg							
					Fasilitasi Penyelenggaraan Workshop RUPM Anggota MPU bidang Penanaman Modal		1 Keg							
					Fasilitasi Pengiriman Anggota Kerjasama Daerah MPU		1 Keg							
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				1.007.000.000				1.206.441.000		
					Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan		100%							
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				237.000.000				237.000.000		
					Penyusunan Laporan Neraca Saldo Semester I		1 Dok							

					Penyusunan Laporan Neraca Saldo Semester II		1 Dok							
					Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester I		1 Dok							
					Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester II		1 Dok							
					Penyusunan Lap. Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara		1 Dok							
					Penyusunan Lap. Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara		1 Dok							
					Penyusunan Data TLHP Reguler I		1 Dok							
					Penyusunan Data TLHP Reguler II		1 Dok							
					Penyusunan CALK BKPMD TA 2013		1 Dok							
					Penyusunan Laporan Prognosis		1 Dok							
					Penyusunan Data SP2D TA 2013		1 Dok							
					Upgrade Software Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan		1 Paket							
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				770.000.000				969.441.000		
					Penyusunan dan Workshop RKA Perubahan 2013		12 Dok							
					Penyusunan dan Workshop DPPA Perubahan Tahun Anggaran 2013		12 Dok							
					Penyusunan dan Workshop RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2014		12 Dok							
					Penyusunan dan Workshop DPPA SKPD APBD Tahun Anggaran 2014		12 Dok							
					Penyusunan Renja BKPMPT Tahun 2014		1 Dok							
					Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Penanaman Modal		1 Keg							
					Fasilitasi Pengiriman Peserta KP3MN Tahun 2013		6 Org x 3 hari							
					Fasilitasi Pengiriman Peserta Mukornis 3 Provinsi		7 Org x 3 hari							
					Penyusunan LKPJ Bidang Penanaman Modal		1 Dok							
					Penyusunan LAKIP Bidang Penanaman Modal		1 Dok							
					Penyusunan Bahan LPPD Bidang Penanaman Modal		1 Dok							
					Fasilitasi Pengiriman Peserta KP3MR Tahun 2013		7 Org x 3 hari							
					Penyusunan Laporan Tahunan BKPMD		1 Dok							
					Koordinasi, Konsultasi dan Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan		4 Org							
					Rakor dan Bintek Perencanaan Penanaman Modal Provinsi Banten		1 Keg							

					Evaluasi Program Kegiatan 2013 Triwulanan		1 Dok							
					Penyusunan Revisi RUPM Provinsi Banten		1 Dok							
					Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan		1 Dok							
					Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan BKPMPT T.A		1 Dok							
					Workshop Revisi RUPM Provinsi Banten		1 Keg							
					Penyusunan TAPKIN dan IKU		1 Dok							
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				2.468.000.000				2.468.000.000		
					Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan		100%							
					Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		100%							
1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				278.500.000				127.400.000		
					Belanja Modal Penunjang Kantor		3 Paket							
					Belanja Modal Alat Kantor		6 Unit							
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				520.000.000				671.100.000		
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPMPT		34 Unit							
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				1.669.500.000				1.669.500.000		
					Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		45 Org							
					Pengiriman Wawasan Aparatur BKPMPT, Peningkatan Kapasitas Aparatur Bahasa Asing		20 Org							
					Penyediaan Jasa Tenaga Kantor		26 Org							
					Penyediaan Bahan Penunjang disiplin Aparatur BKPMPT		9 Stel pakaian							
					Pengadaan Barang Jasa		1 Paket							
1	23			Statistik										
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah				1.650.000.000				1.490.559.000		
					Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)		1 Paket							
1	23	1	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan				1.650.000.000				1.490.559.000		
					Penyusunan dan Profil BKPMPT Tahun 2013		1 Dok							
					Penyusunan dan Pengadaan Materi Publikasi PPID T.A 2013		1 Paket							
					Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan PPID		4 Triwulan							
					Penyusunan Data Statistik Pembangunan bidang Penanaman Modal		1 Dok							

					Pengelolaan Website BKPMPT Provinsi Banten		12 Bulan							
					Penyusunan Data Perkembangan Investasi PMA dan PMDN		4 Dok							
					Penyusunan Peluang Data Investasi Sektoral		1 Dok							
					Penyusunan Profil Kawaan Industri di Provinsi Banten		1 Dok							
					Koordinasi dan Konsultasi (DKI, BKPM RI dan JABAR)		12 Bulan							
					Pemutahiran Data Direktori PMA dan PMDN		1 Dok							
					Penyusunan Profil Potensi Agribisnis Banten Selatan		1 Dok							
					Publikasi Program Kegiatan BKPMPT		12 Bulan							
JUMLAH								13.050.000.000				13.050.000.000		

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN 2013				SETELAH PERUBAHAN 2013				Keterangan
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian	Jumlah	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1				Urusan Wajib										
1	8			Lingkungan Hidup										
1	8	1		Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				5.052.000.000				5.052.000.000		
					Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM		20%							
					Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup		20%							
1	8	1	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan				977.000.000				977.000.000		
					Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara bagi Industri		40 industri							
					Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Air bagi		40 industri							
					Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Udara		40 industri							
					Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung		10 kali							
					Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten		10 kali							
					Pemantauan Kualitas Udara Ambien		8 kab/kota							
					Penyusunan Database Pengendalian Pencemaran Air dan		1 aplikasi							
1	8	1	2	Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3				800.000.000				800.000.000		
					Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah B3		40 industri							
					Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan limbah industri		50 industri							
					Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah Medis		50 RS							
					Pengawasan Tindak Lanjut Pengelolaan Limbah Medis/Rumah Sakit		40 RS							
					Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan bahan perusak ozon		40 peserta							
					Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon		40 bengkel							
					Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon		40 bengkel							
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Perkotaan		1 laporan							

					Penyusunan Database Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi Banten		1 laporan							
1	8	1	3	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan				700.000.000				700.000.000		
					Fasilitasi Program Adipura		8 kab/kota							
					Fasilitasi Program Adiwiyata		8 kab/kota							
					Publikasi Lingkungan Hidup		1 keg							
					Fasilitasi Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Banten		1 keg							
					Fasilitasi kegiatan eco-office		1 keg							
1	8	1	4	Pengkajian Dampak Lingkungan				1.125.000.000				1.125.000.000		
					Fasilitasi Operasional Komisi AMDAL Daerah Provinsi Banten		1 dokumen							
					Fasilitasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Amdal		1 keg							
					Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL/RPL bagi usaha/kegiatan		35 usaha/keg							
					Penyusunan Laporan RPL/RKL KP3B, Badiklat dan Mapolda Banten		6 dokumen							
					Penyusunan Kajian Akademis Penapisan tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal di Provinsi Banten		1 keg							
					Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Banten dan Kab/kota		1 keg							
					Penyusunan Kajian Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Banten		1 dokumen							
1	8	1	5	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup				850.000.000				850.000.000		
					Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup BLHD Provinsi Banten		7 kasus (7 dokumen							
					Fasilitasi Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten		1 dokumen							
					Sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder		3 keg							
					Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten		2 keg							
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup		1 dokumen							
1	8	1	6	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan				600.000.000				600.000.000		
					Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan		40 orang							

					Rapat Koordinasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah		3 kali							
					Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		250 orang							
1	8	2		Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup				1.000.000.000				1.000.000.000		
					Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung		20%							
1	8	2	1	Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam				500.000.000				500.000.000		
					Fasilitasi Forum Komunikasi DAS Cidanau		7 kali							
					Fasilitasi Forum Pelestarian DAS Ciujung		7 kali							
					Fasilitasi Forum Komunikasi Pegunungan Akarsari (FKPA)		6 kali							
					Fasilitasi Forum DAS Ciliman		7 kali							
					Bimbingan teknis Keanekaragaman hayati (kehati)		1 keg							
					Workshop Identifikasi dan pengelolaan Biodeversity		1 keg							
1	8	2	2	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air				500.000.000				500.000.000		
					Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi dan Rencana Aksi Pelestarian Situ di Wilayah Provinsi		40 peserta							
					Pemantauan dan penyusunan data kerusakan Ekosistem Situ di Wilayah Provinsi Banten		1 dokumen							
					Bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut		50 peserta							
					Fasilitasi kegiatan sumberdaya air, pesisir dan laut		2 keg							
					Pembinaan Masyarakat sekitar mata air		120 peserta							
1	20			Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan pemendian										
1	20	9		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				950.000.000				950.000.000		
					Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan	100%								
					Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan	100%								
1	20	9	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				100.000.000				100.000.000		
					Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I	1 dokumen								

					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Prognosis	1 dokumen								
					Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III	1 dokumen								
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								
					Sosialisasi Tata Kelola Keuangan	25 orang								
1	20	9	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				850.000.000				850.000.000		
					Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota		50 peserta							
					Penyusunan Rencana Kerja BLHD Tahun 2014		1 dokumen							
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BLHD		1 dokumen							
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)		1 dokumen							
					Penyusunan Laporan SPM Bidang LH Tingkat Provinsi tahun 2012		1 dokumen							
					Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bid. LH Kab/Kota		30 orang/keg							
					Penyusunan LPPD BLHD Provinsi Banten		1 dokumen							
					Penyusunan Dokumen RKA 2014		1 dokumen							
					Penyusunan Dokumen LKPJ BLHD		1 dokumen							
					Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		12 bln							
					Mitra Praja Utama		1 keg							
					Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		1 keg							
1	20	10		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur				1.723.000.000				1.723.000.000		
					Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan		100%							
1	20	10	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				373.000.000				373.000.000		
					Pengadaan Sarana dan prasarana kantor		49 unit							
1	20	10	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				200.000.000				200.000.000		
					Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		12 bulan							
1	20	10	3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				1.150.000.000				1.150.000.000		
					Penyediaan Tenaga Kerja Satpam, Supir dan Pramubakti / Cleaning Service dan operasional kantor		12 bulan							
					Penyediaaan penunjang operasional kantor selama 12 (Dua		12 bulan							
1	23	1		Penyediaan Data Pembangunan Daerah				275.000.000				275.000.000		
					Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan		100%							

1	23	1	1	Penyediaan Data Pembangunan				275.000.000				275.000.000		
					Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten 2012		1 dokumen							
					Pembuatan Sistem Informasi Lingkungan		1 aplikasi							
JUMLAH								9.000.000.000				9.000.000.000		